

**PEMIKIRAN K. H ABDURRAHMAN WAHID TENTANG
RELASI MILITER-SIPIL**



**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Politik**

OLEH:

M. NOPRIANZAH

NIM. 1730702070

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
1442 H/ 2021**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara, M. Noprianzah dengan NIM. 1730702070 yang berjudul **Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 06 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. Kun Budianto, M.,Si
NIP. 197612072007011010

Pembimbing II



Yulion Zalpa, M. A
NIP. 19880707201903101

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : M. Nopriazah
Nim : 1730702070
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil

Telah dimunaqosahkan dalam sidang *Offline* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

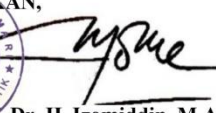
Hari / Tanggal : Selasa / 08 Juni 2021
Tempat : Di Ruang LAB Fisip UIN Raden Fatah Palembang

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 10 Juni 2021

DEKAN,




Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A
NIP. 196206201988031001

TIM PENGUJI

KETUA

Dr. EtiYusnita, S.AgM.Hi
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS

Reni Apriani, M.Si
NIDN. 2021049401

PENGUJI 1

Anur Ropik, M.Si
MA
NIP. 197906192007101005

PENGUJI 2

Ryllian Chandra EkaViana,
NIP. 198604052019031011

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Noprianzah
Tempat & Tanggal Lahir : Muara Tenang, 27 November 1998
NIM : 1730702070
Jurusan : Ilmu Politik
Judul skripsi : Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 06 Juni 2021
Yang Membuat Pernyataan


M. Noprianzah
NIM.1730702070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”

PERSEMBAHAN

- Kedua orang tua terkasih dan sayang, Ayah dan Ibu (Kolman Bahdi dan Jumhainah) yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang selalu mengiringi setiap langkah;
- Saudara saya adik perempuan ku Selviyanah dan Mery Anggraeni yang senantiasa memberikan doa dan semangat;
- Almamaterku tercinta;
- Sahabat-Sahabat ku yang selalu mengerti dan menemani Ahmad Gandi Saputra, Dita Pratiwi, Luthfi Akhiri Ramdhan, dan M Orlandio Sumaher;
- Serta sahabat-sahabat ku lainnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Assalammu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbil'alamiin, puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq, hidayah serta 'inayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam, tak lupa juga kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, dan sahabatnya, berkat perjuangan beliau yang telah mengubah peradaban dunia dari masa kebodohan menuju masa yang dipenuhi dengan perkembangan ilmu serta teknologi, sehingga manusia mampu untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan sunnahnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat serta guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul skripsi ini ialah "Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil". Pelaksanaan dalam menyelesaikan skripsi ini begitu banyak kesulitan, namun berkat hidayah dari Allah SWT dan doa dari berbagai pihak serta bimbingan dari semua pihak yang terkait skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.A sebagai Rektor UIN Raden Fatah Palembang;
2. Prof. Dr. Izomiddin, MA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang;

3. Dr. Yenrizal, M.Si sebagai Wakil Dekan I FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
4. Ainur Ropik, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan II FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
5. Dr. Kun Budianto, M.Si sebagai Wakil Dekan III FISIP UIN Raden Fatah Palembang sekaligus Dosen Pembimbing I skripsi saya;
6. Dr.Eti Yusnita, S.Ag. M.Hi sebagai Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
7. Ryllian Chandra Eka Viana, M.A sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
8. Yulion Zalva, M.A sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya dan sebagai Dosen Pembimbing II skripsi saya;
9. Erik Darmawan, S.IP., MH.I sebagai mentor yang membimbing saya sebelum memulai skripsi (Klinik Skripsi);
10. Seluruh Dosen Ilmu Politik dan Staff Pegawai Administrasi FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
11. CSR Millenials Kesajhteraan Sosial Sumatera Selatan;
12. Kelas Ilmu Politik B FISIP UIN Raden Fatah Palembang;
13. Semua pihak yang turut terlibat dalam membantu pengerjaan skripsi ini
Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum dimasa yang akan datang. *Aamin Ya Rabbal'alamiin.*

Wassalammu 'alaikum wr wb

Palembang, Juni 2021

M. Noprianzah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemikiran K H Abdurrahman Wahid tentang relasi militer-sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran K. H Abdurrahman Wahid tentang relasi militer-sipil. Fokus dalam penelitian ini yaitu pemikiran K. H Abdurrahman Wahid tentang hubungan militer-sipil di era pemerintahannya. Teori yang digunakan adalah teori kontrol sipil atas militer oleh Samuel P Huntington yang dikaitkan dengan relasi militer-sipil dengan teori ini mampu menganalisa pemikiran K. H Abdurrahman Wahid tentang relasi militer-sipil. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan, data dikumpulkan dan dianalisa. Melalui pengumpulan referensi berupa buku bacaan, jurnal, artikel, surat kabar dan hasil analisa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran K. H Abdurrahman Wahid tentang relasi militer-sipil di era Abdurrahman Wahid ditandai dengan upaya Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses depolitisasi militer dengan pendekatan legalis kelembagaan formal. Salah satu inisiatif penting Abdurrahman Wahid untuk menciptakan supremasi sipil namun terdapat beberapa kegagalan dalam pencapaian supremasi sipil.

Kata Kunci : K. H Abdurrahman Wahid, Militer, Kontrol Sipil

Abstract

This research discussed K H Abdurrahman Wahid's thoughts on military-civilian relations. This study aims to find out K. H Abdurrahman Wahid's thoughts on military-civilian relations. The focus of this study was K. H Abdurrahman Wahid's thoughts on military-civilian relations in his reign. The theory used was the theory of civilian control over the military by Samuel P Huntington which was associated with military-civilian relations with this theory was able to analyze K. H Abdurrahman Wahid's thoughts on military-civilian relations. The type of research used is descriptive with qualitative approach. The source of the data in this study is literature, data collected and analyzed. Through the collection of references in the form of reading books, journals, articles, newspapers and analysis results. The results of this study showed that K. H Abdurrahman Wahid's thoughts on military-civilian relations in the Abdurrahman Wahid era were marked by Abdurrahman Wahid's efforts to continue the process of military depolitization with a formal institutional legalist approach. One of Abdurrahman Wahid's important initiatives was to create civil supremacy but there were several failures in achieving civil supremacy.

Keywords: *K. H Abdurrahman Wahid, Military, Civil Control*

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Surat Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiv
Daftar Diagram	xv
Daftar Singkatan	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis	7
2. Kegunaan Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metodologi Penelitian	17
1. Pendekatan/Metode Penelitian	18

2. Data dan Sumber Data	18
3. Teknik Pengumpulan Data	19
4. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN	22
A. Konsep Pemikiran	22
B. Militer.....	23
1. Definisi Militer.....	23
2. Sejarah Militer di Indonesia.....	23
3. Awal Keterlibatan Tentara Dalam Kelembagaan Politik.....	24
4. Tentara Indonesia dan Politik.....	27
5. Fungsi Militer.....	32
C. Sipil.....	33
1. Definisi Sipil	33
2. Ragam Kendali Sipil	34
3. Keseimbangan Kendali Sipil Objektif	35
4. Membangun Civil Society Untuk Pembangunan Demokrasi	36
D. Pola Hubungan Militer-Sipil.....	38
E. Tingkatan Hubungan Militer-Sipil	40
BAB III RIWAYAT HIDUP DAN DINAMIKA POLITIK K. H	
ABDURRAHMAN WAHID.....	47
A. Riwayat Hidup dan Silsilah K. H Abdurrahman Wahid.....	47
B. Dinamika Politik K. H Abdurrahman Wahid	59

1. Proses Terpilihnya K. H Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4	50
2. Pembentukan Kabinet Pemerintahan K. H Abdurrahman Wahid	56
3. TNI di Bawah Kepemimpinan K. H Abdurrahman Wahid	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Konsep Militer-Sipil Dalam Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid.....	63
1. Konsep Militer-Sipil K. H Abdurrahman Wahid.....	66
B. Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Terhadap Eksistensi Militer Dalam Negara	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Hasil Pemilihan dan Perkiraan Sumber Dukungan Calon Presiden dalam SU MPR 1999	72
Tabel III.2 Susunan Menteri Kabinet Persatuan Nasional Berdasarkan Pemberi Rekomendasi dan Latar Belakang	75

DAFTAR DIAGRAM

Diagram I.1 Perbedaan kontrol sipil yang subjektif dan objektif	32
---	----

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen)
GOLKAR	: Golongan Karya
G30S/PKI	: Gerakan Tiga Puluh September/Partai komunis Indonesia
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
HAM	: Hak Asasi Manusia
KASAD/KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
KKP	: Komisi Penyelidik Pelanggaran
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NU	: Nahdatul Ulama
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PAN	: Partai Amanat Nasional
SU-MPR	: Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

TNI AL : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

TNI AU : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Sementara itu, Harold J. Laski mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. (Rasyid, 2017)

Salah satu organ yang perlu dimiliki pemerintahan suatu Negara adalah militer, yang merupakan suatu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin untuk melakukan pertempuran, yang diperbedakan dari orang-orang sipil. Finer mengemukakan tujuan pokok adanya militer dalam suatu negara yaitu: untuk bertempur dan memenangkan peperangan guna mempertahankan dan memelihara eksistensi negara. Fungsi militer di dalam negara adalah melakukan tugas dibidang pertahanan dan keamanan, yang disebut “fungsi militer”. Sedangkan tugas-tugas diluar bidang pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas golongan sipil.

Disebuah negara, militer merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan Nasional. Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara dalam pertahanan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diimplementasikan dalam wujud program bela negara atas dasar kecintaan terhadap Tanah Air.

Munculnya militer dipangung politik, negara-negara berkembang, berpangkal pada lemahnya pihak sipil untuk mengendalikan kesemua unsur-unsur kehidupan masyarakat. Politisi sipil yang dengan relatif cepat dihadapkan kepada segala masalah seperti penyusunan suatu sistem politik yang sama sekali lepas dari kekuasaan asing, mengorganisir masyarakat yang relatif tergesa-gesa berhadapan dengan tuntutan modernisasi, masih mencoba model-model yang mungkin dipergunakan untuk melayani tuntutan-tuntutan masyarakatnya sendiri. (Sanit, 2012)

Keterlibatan militer dalam politik bukan hal baru di Indonesia. Militer di Indonesia melibatkan diri kedalam politik dengan terlibat langsung dalam perjuangan merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam perjuangan tersebut, militer melakukan metode kesemestaan yang dimana militer tidak hanya melakukan pertempuran secara fisik, tetapi juga terlibat dalam

strategi penyusunan pendirian bangsa Indonesia dan berjuang bersama rakyat (Nasution, 2014).

Pada masa setelah proklamasi kemerdekaan 1945, atau masa perang kemerdekaan sampai berdirinya pemerintahan Republik Indonesia Serikat pada 1950. Pada masa ini, tentara terpaksa berpartisipasi dalam politik untuk menggerakkan pemerintahan di daerah yang lumpuh akibat dalam keadaan perang melawan belanda. Dan pada mulai berlakunya demokrasi parlemen 1950 ke demokrasi terpimpin, yang dimulai dengan dekrit presiden pada 5 Juli 1959 sampai jatuhnya Presiden Soekarno pada 1966. Pada masa ini, tentara memiliki kekuatan politik yang menonjol dan bersaing dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Tentara, terutama Angkatan Darat, menjadi mitra Soekarno sekaligus pesaing. Pada masa ini, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah ke otokratis.

Pada masa Orde Baru mulai 11 Maret 1966, yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dengan demokrasi Pancasila sampai jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada masa ini, tentara mendominasi pemerintahan yang bersifat otokratis, dengan menggunakan dwifungsinya yang mengakibatkan demokrasi tidak dapat berkembang dan militer memiliki peranan dominan dalam politik. Dominasi peran militer dalam politik merupakan usaha rezim Orde Baru untuk mempertahankan kekuasannya. Rezim Orde Baru membangun opini masyarakat tentang sejarah ABRI, seakan-akan pada masa lalu ABRI sudah ikut menentukan nasib negara secara politik. Dari sinilah kemudian dibangun sistem pemerintahan yang

militeristik dengan mengikutsertakan ABRI dalam politik penyelenggaraan negara. (Pamungkas, 2001)

Jenderal Suharto diangkat sebagai presiden oleh MPRS pada tahun 1968, memberikan militer posisi dominan dalam manajemen pemerintahan. Pemerintahan baru ini disambut hangat oleh beberapa politisi sipil, tetapi kebanyakan orang dengan enggan menerimanya karena tentara adalah yang terkuat pada saat itu. Di era orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, peran TNI yang sebenarnya adalah pertahanan dan keamanan. Salah satu kinerja ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang berupaya mempertahankan dan mewujudkan cita-cita orde baru adalah dengan menempatkan pegawai ABRI pada lembaga/lembaga/lembaga/organisasi di luar tim ABRI sebagai pelaksana dwifungsi ABRI. tujuan misi yang pertama adalah sebagai jaminan politik ideologi, terutama pada masa-masa awal orde baru. Kedua, untuk mencapai tujuan perencanaan pembangunan yang dicanangkan oleh Repelita dalam rangka keberhasilan pembangunan negara.

Birokrasi merupakan alat pembangunan yang penting, tidak hanya digunakan untuk membantu merumuskan dan mewujudkan tujuan teknis kebijakan pembangunan, tetapi juga untuk tujuan politik, yaitu menjaga stabilitas kekuasaan negara secara internal dan mengontrol masyarakat secara eksternal. Meskipun posisi kekuasaan biasanya dibagi dengan warga sipil, warga sipil harus mematuhi sistem di mana kekuasaan ada di tangan militer. Pada masa pemerintahan Orde Baru, meskipun pemerintah mengaku menganut sistem demokrasi, yang terjadi justru sebaliknya, demi keamanan stabilitas politik dan

keberhasilan pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan kontrol militer terhadap warga sipil.

Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto pada 21 Mei 1998, oleh gerakan mahasiswa yang disebut Gerakan Reformasi, posisi ABRI dalam lanskap politik Indonesia juga mengalami penurunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ABRI dan Golkar adalah kekuatan politik orde baru secara bersama-sama. Runtuhnya orde baru berarti ABRI runtuh sebagai penopang pemerintah, karena ABRI pada masa orde baru lebih merupakan alat pemerintah yang berkuasa daripada alat untuk melindungi negara dari segala ancaman.

Kemunculan Abdurrahman Wahid di kalangan tokoh nasional membawa harapan besar bagi perkembangan proses demokratisasi di Indonesia, karena Abdurrahman Wahid telah menjadi pelopor dan pejuang demokrasi sejak pemerintahan orde baru berkuasa. Jika sistem orde baru sangat otoriter, dan kekuasaan terletak pada seorang ketua tunggal yang dapat mengontrol kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan, maka dengan terpilihnya Abdurrahman Wahid, sistem pemerintahan cenderung bergeser ke sistem yang lebih demokratis. Dalam proses transisi menuju rezim demokrasi, penyesuaian kembali peran TNI dalam kehidupan politik merupakan prasyarat penting yang harus dilakukan.

Presiden Abdurrahman Wahid mengembangkan kebijakan untuk memisahkan posisi Menhan dan Panglima TNI, yang merupakan langkah awal beliau dalam mengelola peran TNI. Kebijakan ini dilanjutkan dengan pengisian jabatan Menhan dari staf sipil, yaitu profesor PhD. Juwono Sudarsono, dalam

sejarah Orde Baru, Menteri Pertahanan pernah diduduki oleh personel militer. Pada masa pemerintahan Presiden Abdullahman Wahid, jabatan Menteri Pertahanan terbagi menjadi dua jabatan, yaitu Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Akibat reformasi internal ABRI, nama ABRI diubah kembali menjadi TNI, akibatnya POLRI harus dipisahkan dari ABRI yang posisinya saat itu dipimpin oleh Presiden.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan melihat Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid dari awal menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-empat tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 sebagai akhir dari kepemimpinannya yang belum tuntas. Peneliti juga memfokuskan pada relasi militer-sipil pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam hal kemiliteran yang memiliki dampak cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia pada masa itu.

Berawal dari latar belakang diatas serta ketertarikan penulis ingin meneliti lebih jauh tentang Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid. Maka penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut serta akan dituangkan kedalam bentuk karya tulis ilmiah. Maka Penulis merumuskan penelitian ini dengan judul **“Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, Untuk mengetahui Bagaimanakah Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan kajian dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para peneliti khususnya bagi civitas akademika UIN Raden Fatah sebagai pertimbangan bagi pembaca, peneliti mengenai “Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil”.

E. Tinjauan Pustaka

Persoalan sipil dan militer pada negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II telah sejak lama mendapat perhatian para ilmuwan. Tampak bahwa minat mereka untuk mengkaji persoalan sipil militer itu terkait pada kenyataan bahwa sejumlah negara-negara baru itu memilih sistem pemerintahan demokrasi. Namun pihak militer telah mengambil kedudukan penting dan menentukan dalam ranah politik. Hasil kajian yang dilakukan para ilmuwan tersebut menarik untuk diperhatikan dalam mengkaji lebih lanjut hubungan sipil-militer dalam sejumlah negara, yang memilih sistem pemerintahan demokrasi, termasuk negara kita, Republik Indonesia, (Edward L. Poelinggomang, 2002). Dalam melakukan kajian kegiatan penelitian ini, peneliti menganalisis terhadap penelitian sebelumnya yang membahas mengenai (Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil). Telah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan terhadap penelitian, yang akan dibahas oleh peneliti, antara lain yaitu:

Pertama, dari penelitian Nurhasanah Leni yang dituangkan dalam artikel yang berjudul Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik di Indonesia terkait dengan Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid tentang Relasi Militer-Sipil, menyebutkan bahwa Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan *politicking* demi

kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik.

Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar, dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpungan di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil.

Rakyat perlu mendukung terbentuknya Doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang membela setiap jengkal wilayah teritorial Republik Indonesia, yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian tinggi. (Leni, 2013)

Kedua dari David Setiawan dkk yang berjudul Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil di Indonesia mengemukakan pendapat bahwa ketika kekuasaan Orde Baru Militer memiliki peran aktif dan pembuatan politik dalam pemerintahan Indonesia Di Indonesia gelombang reformasi juga berpartisipasi dalam ruang terbuka pada ruang lebih besar untuk diskusi hubungan sipil-militer yang terkait dengan proses demokrasi. Selama ini hubungan sipil-militer tidak hanya dibangun diatas doktrin militer, namun juga masyarakat sipil. Sehingga menjelaskan bahwa profesional militer dapat terjadi jika mereka tidak ikut campur dalam politik. Ini juga mempengaruhi pembentukan masa depan suatu pemerintahan demokratis

yang mencakup hukum, akuntabilitas publik, militer dalam kebijakan personel, penentuan tingkat kekuasaan, masalah pendidikan yang akhirnya dapat menetapkan kebijakan dibidang pertahanan dalam hubungan sipil-militer yang harmonis. (Setiawan, 2013)

Ketiga dari Rifqa Deni Amanah dalam artikel yang berjudul *Politics Military In Post-New Order Indonesia* mengatakan bahwa politik Indonesia pasca Orde Baru yang menekankan pada perubahan masalah militer dalam politik. Terutama di pemerintahan Indonesia, sistem sipil-militer yang masih tumpang tindih dalam politik, hal itu disebabkan oleh semakin besarnya peran militer di Indonesia pada masa Orde Baru.

Berdasarkan hasil penelitian analisis dapat disimpulkan bahwa militer Indonesia selalu mengalami proses perubahan di setiap transisi pemerintahan. Jadi, itulah politik militer selalu memiliki sistem yang berbeda dan disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berlaku. Pemerintahan Indonesia dalam politik belum dapat melepaskan diri dari militer, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama lemahnya kontrol sipil dan nilai moral profesional yang selalu berbeda-beda sehingga memungkinkan pemahaman terhadap institusi militer itu sendiri. (Amanah)

Ke-empat dari Koesnadi Kardi dari artikel yang berjudul *Demokratisasi Relasi Militer-Sipil pada Era Reformasi di Indonesia* mengungkapkan bahwa Reformasi militer di Indonesia itu telah menghasilkan beberapa perubahan, baik dalam kultural, struktural, doktrinal, maupun organisasional. Akan tetapi, perubahan-perubahan tersebut belum mencapai tatanan yang fundamental terkait

relasi sipil-militer yang demokratis yang bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia yang menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil-militer itu bergantung pada tatanan lembaga militer yang terkait dengan kegigihan, arahan, dan inisiatif institusi sipil itu sendiri.

Fenomena yang terjadi di Indonesia memiliki ciri tersendiri karena sejarah pembentukan TNI didasarkan pada perjuangan untuk mengusir penjajah, bukan untuk meningkatkan karir dalam bidang militer. TNI banyak berjasa dalam penyelenggaraan negara sebelumnya di bidang militer, kemudian di dalam politik, dan selanjutnya di bidang ekonomi, untuk tujuan menyejahterakan bangsa. Adapun di Amerika Serikat, militer dibentuk oleh kebutuhan sipil untuk berkarir menjadi perwira militer yang profesional. Amerika Serikat juga tidak memiliki sejarah sebagai bangsa yang dijajah, sehingga pembentukan otoritas sipil terhadap militer di sana tidak mengalami hambatan yang signifikan dibandingkan dengan di Indonesia. (Kardi, 2014)

Kelima dari Adam Sukarno Putra, Nurul Umamah, Sumarno yang berjudul Kebijakan Politik Presiden Abdurrahman Wahid Tentang Militer di Indonesia Tahun 1999-2001 Simpulan dalam penelitian ini adalah hal-hal yang melatarbelakangi pengambilan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia adalah karena dua hal, yaitu tentang konsepsi dan pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang selama ini disalahgunakan oleh pihak militer, sehingga melewati batas tugas dan wewenangnya. Alasan yang kedua adalah adanya tuntutan reformasi setelah jatunya Soeharto dari kursi Kepresidenan. Adapun

Kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia yang selama ini telah dilakukan ada beberapa hal, yaitu sebagaimana berikut:

- a. Dengan melakukan supremasi sipil atas militer dan reposisi dalam tubuh internal militer;
- b. Menghapus peran sosial politik di tubuh TNI dan memfokuskan pada pertahanan dan keamanan saja;
- c. Membubarkan dua institusi yang selama ini menjadi alat kontrol sipil daripihak militer, yaitu lembaga Bakorstanas dan Litsus;
- d. Merealisasikan pemisahan TNI dan Polri yang memiliki lembaga dan tugas yang berbeda satu sama lainnya;
- e. Meningkatkan anggaran belanja militer untuk kesejahteraan prajurit TNI yang awalnya hanya 1,5% dari APBN, ditambah menjadi 5,5% dari APBN.

Adapun Dampak yang diakibatkan dari kebijakan politik Presiden Abdurrahman Wahid tentang militer Indonesia adalah, *Pertama* untuk militer adalah mengurangi hak-hak istimewa yang selama ini didapatkan dengan reposisi jabatan, pemisahan TNI dan Polri, serta penghapusan Dwi Fungsi ABRI, serta naiknya anggaran belanja militer untuk kepentingan kesejahteraan prajurit dan meningkatkan profesionalisme TNI, sedangkan yang *Kedua* dampak bagi Sipil adalah adanya supremasi sipil atas pihak militer. Hal ini dijadikan kekuatan sipil untuk mengontrol pihak militer agar tidak ikut campur urusan sosial politik negara, di sisi lain menjadi acuan bersama untuk terus membangun negara sesuai

dengan tugas dan pokoknya masing-masing lembaga yang ada. (Adam Sukarno Putra, 2019)

Ke-enam penelitian dari Epran Aprianto yang berjudul Peran Abdurrahman Wahid Dalam Politik Di Indonesia (1999-2001) penelitian menjelaskan Peran Abdurrahman Wahid dalam politik di Indonesia (1999-2001) yakni, kiprahnya sebagai presiden RI dalam mereformasi Indonesia berdasarkan Pancasila. K. H. Abdurrahman Wahid membentuk kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Dan beberapa kebijakan penting selama K. H. Abdurrahman Wahid yaitu : bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, bidang hukum, bidang sosial dan budaya. Kebijakan-kebijakannya yang kadang terlalu progresif, sering membuat orang sibuk menebak. Apa yang sedang dipikirkan Abdurrahman Wahid selama waktu-waktu tersebut. Pada pemerintahan Abdurrahman Wahid juga dibukakan kebebasan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Beliau juga telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi.

Ide sosial-politik Abdurrahman Wahid yang diperjuangkan didunia politik Indonesia. *Pertama*, dalam hal Demokratisasi di Indonesia, Abdurrahman Wahid memperjuangkan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, pluralism dan humanism. *Kedua*, pluralisme dalam menjaga dinamisasi keagamaan. *Ketiga*, nasionalisme, Abdurrahman Wahid, memperjuangkan dan mempertahankan NKRI dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Aprianto, 2016)

F. Kerangka Teori

Agar dapat diperoleh interpretasi dan kesimpulan yang lebih terarah dalam menganalisis studi ini. Peneliti menggunakan kerangka teori yang dijadikan landasan studi, yaitu teori Kontrol Sipil atas Militer. Karena teori ini saling berkaitan yang akan digunakan sebagai alat analisis hasil studi ini.

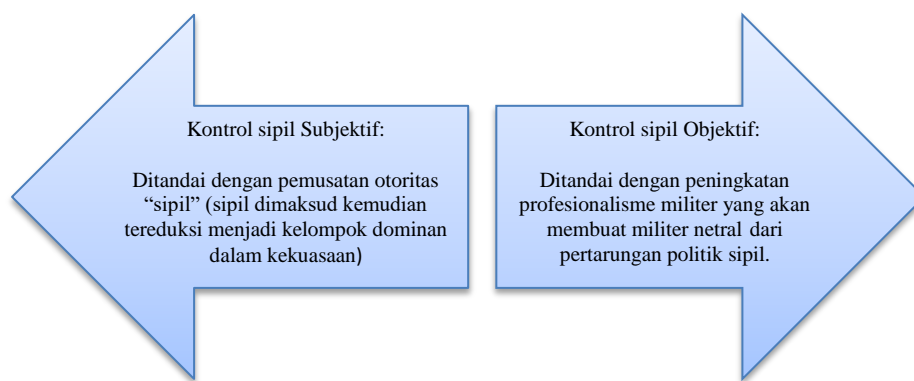
1. Teori Kontrol Sipil atas Militer (Samuel P Huntington)

Ada beberapa teori tentang hubungan militer-sipil. Huntington melihat bahwa terdapat dua bentuk hubungan militer-sipil. *Pertama*, Kontrol Sipil Subjektif, istilah ini mengandung Memaksimalkan Kekuasaan Sipil, cara yang paling sederhana untuk meminimalkan kekuasaan militer tampak dalam memaksimalkan kekuasaan kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Begitu banyak kepentingan kelompok sipil, dengan macam-macam karakteristik dan konflik satu sama lain, sehingga bagaimanapun, menjadikannya tidak mungkin untuk memaksimalkan kekuasaan mereka sebagai suatu kesatuan yang utuh dibandingkan dengan kemiliteran. Sebagai akibatnya, memaksimalkan kekuasaan sipil selalu berarti memaksimalkan kekuasaan beberapa kelompok sipil tertentu. Hal ini merupakan kontrol sipil secara subjektif.

Kedua, Kontrol Sipil yang Objektif istilah ini mengandung Memaksimalkan Profesionalisme Militer, Kontrol sipil di dalam artian objektif adalah memaksimalkan profesionalisme militer. Lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan politik di antara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional diantara para anggota korps perwira. Kontrol sipil yang objektif, dengan

demikian, menentang secara langsung kontrol sipil yang subjektif. Kontrol sipil yang subjektif mencapai tujuan akhirnya dengan mensipilkan pihak militer, menjadikan mereka cermin dari negara. Kontrol sipil yang objektif mencapai tujuan akhirnya dengan memiliterkan pihak militer, menjadikan mereka alat negara. (Huntington, 2003)

Diagram 1.1 Perbedaan kontrol sipil yang subjektif dan objektif



Sumber: (Wulan, 2008)

Dari sekian banyak karya tulis yang menjelaskan tentang Hubungan Sipil-Militer, karya Samuel P Huntington dalam *The Soldier and The State*, dijadikan pedoman dalam menulis studi ini. Huntington, sebagaimana dikutip oleh Almos Perlmutter, secara rinci menjelaskan apa yang disebutnya sebagai *military mind*, sebagai panduan untuk memahami militer secara mendalam. Ia menjelaskan apa yang membedakan prajurit militer dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Salah satunya adalah *uniform* kemiliteran, sistem komando yang ketat, rasa nasionalisme yang kuat dan kohesifitas yang tinggi. Sekalipun hubungan sipil-militer yang dibahas oleh Huntington menggambarkan keadaan di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman, Jepang, dan Perancis, yang memiliki sejarah terbentuknya militer profesional, namun dapat dijadikan pedoman bagi

hubungan sipil-militer di negara lainnya. Hal itu memungkinkan, karena negara-negara tersebut, kemudian membuka sekolah-sekolah militer yang terbuka untuk diikuti oleh militer dari negara lain. (Chrisnandi, 2005)

Samuel Huntington melihat intervensi militer tidak disebabkan oleh faktor internal dari tubuh militer, seperti kelas, kepentingan perorangan, dan kepentingan golongan. Menurutnya, militer merebut peran non-militer lebih diakibatkan oleh tidak stabilnya sistem politik dan kegagalan pemimpin politik untuk menjamin ditaatinya norma dan proses politik. Militer tidak mencampuri urusan politik atau memperluas peran-peran non-militernya apabila sistem dianggap berfungsi dengan baik. Samuel P Huntington membagi masuknya militer ke dalam politik menjadi delapan kategori. Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh militer sebagai reaksi terhadap kekacauan, kemacetan, korupsi, dan sikap reaksioner dari rezim sipil terdahulu;
- 2) Militer yang dimotori oleh para perwiranya, biasanya mempunyai semangat tinggi untuk mengerahkan perhatiannya pada tindakan pembaharuan;
- 3) Adanya pendekatan rasional terhadap problema sosial dari kelompok militer telah membentuk perwira-perwira yang mampu dan dapat di andalkan sebagai modernisator (*modernisator par excellence*);
- 4) Adanya sikap tidak peduli dan menentang terhadap kebutuhan pembangunan lembaga-lembaga politik maka rezim sipil menganggap militer tidak mempunyai kepentingan politik yang harus diperjuangkan;

- 5) Pada umumnya bilamana terjadi pengambilalihan kekuasaan oleh militer, hal ini dinyatakan sebagai untuk sementara waktu dan akan dikembalikan pada rezim sipil jika keadaan politik sudah stabil;
- 6) Apabila pengambilalihan kekuasaan politik dari militer ke tangan sipil, tidaklah berarti persoalan telah selesai karena sewaktu-waktu dapat timbul kudeta militer yang baru. Hal ini merupakan kecenderungan yang paling besar dan sering terjadi di beberapa negara berkembang;
- 7) Kemungkinan akan terjadi kudeta militer dengan alasan serupa;
- 8) Bilamana militer tetap mempertahankan kekuasaannya maka mereka perlu menciptakan lembaga-lembaga politik yang berwenang mengesahkan dan melembagakan kekuasaan mereka. (Priadi, 2007)

Menurut peneliti teori kontrol sipil atas militer dari Samuel P Huntington. Lebih mendekati dalam menganalisis penelitian ini karena teori kontrol sipil atas militer tersebut paling tepat untuk menjelaskan atau menggambarkan Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil. Yang memiliki unsur-unsur yang sesuai dengan penelitian peneliti dimana pemikiran dari seseorang itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang akan dilakukan.

G. Metodologi Penelitian

Pengetahuan (*knowledge*) dan ilmu (*science*) berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar (*macro cosmos*) maupun alam kecil (*micro cosmos*). Kekaguman tersebut kemudian menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu (*curiosity*). Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Untuk itu

manusia menempuh berbagai upaya agar memperoleh pengetahuan yang benar.
(Nawawi, 2002)

a. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang telah terjadi di Indonesia. Yang kemudian peneliti interpretasikan dengan menggunakan metode penulisan, pengkodean, dan analisis.

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang telah terjadi melalui penelitian studi kepustakaan sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan fenomena yang penulis teliti dalam penelitian ini, tentang Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil.

b. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah darimana seorang penulis memperoleh data tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data antara lain :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pengamatan yang dilakukan dengan menganalisis kejadian/peristiwa.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan peneliti untuk memperkuat atau sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang berbentuk buku bacaan, artikel, jurnal, dan hasil analisis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi kerangka teoritis dan kerangka konsep dengan menggunakan referensi berupa yaitu buku bacaan, artikel, jurnal, surat kabar dan hasil analisis.

d. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh untuk mendukung proses analisa, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa data. Dalam analisa data ini, data yang sudah terkumpul akan diolah dan kemudian akan di analisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil dari penelitian. Penelitian ini mencoba menganalisis Pemikiran K.H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu :

a) Reduksi Data

Reduksi data mengacu pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan “data

mentah” yang terjadi dalam catatan lapangan tertulis. Seperti yang kita semua tahu, reduksi data terus terjadi sepanjang siklus hidup proyek berorientasi kualitas. Oleh karena itu, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir.

b) Penyajian Data/ Model Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan model data yang memaparkan data yang direduksi yang bertujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang data yang kita peroleh selama penelitian.

c) Penarikan Kesimpulan/ *Verifikasi Kesimpulan*

Langkah ketiga dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan data yang telah diproses kemudian diambil kesimpulan yang objektif dan kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada bagian reduksi dan penyajian data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti. (Emzir, 2014)

H. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan proposal ini, tersusun menjadi beberapa bagian dari sistematika penulisan serta gambaran rencana penulisan laporan untuk bab-bab selanjutnya, adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang merupakan penjelasan singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang dibuat yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian dan daftar pustaka.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

Bagian ini khusus membicarakan tentang berbagai materi yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

BAB III : RIWAYAT HIDUP DAN DINAMIKA POLITIK

Bagian ini menjelaskan riwayat hidup, silsilah dan dinamika politik K. H Adurrahman Wahid.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan data dan hasil analisis dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada secara sistematis dan ilmiah.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran Kesimpulan adalah point-point yang sangat penting dari penelitian tentang Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil, sedangkan saran adalah berisi masukan yang diberikan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN YANG RELEVAN

A. Konsep Pemikiran

Pengertian sederhana Pemikiran merupakan hubungan yang sistematis antara diskursus dan perubahan sosial. Menurut Van Dijk, diskursus bisa menjadi unit analisis yang komprehensif untuk membaca gejala sosial. Memang, sejarah peradaban telah mencatat bahwa kehadiran diskursus yang diproduksi oleh para intelektual mampu dijadikan objek untuk melihat pergulatan atas pemaknaan yang terjadi pada status sosial. Berki (1977) mencatat karya-karya para pemikir sejak zaman kuno hingga sekarang, yang ternyata mampu memberikan pemetaan atas persoalan-persoalan besar yang terjadi pada kehidupan peradaban mereka. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Tajera (1984), yang menjelaskan bahwa perilaku *city-state* menjadi alasan kenapa orang berpikir tentang dan memikirkan politik. Ketidakharmisan yang terjadi antara kehidupan *city-state* menjadi stimulus bagi para intelektual untuk berpikir politik. Pandangan Tejera dan Lane tersebut seakan menegaskan bahwa pemikiran politik akan selalu melekat pada setiap zaman (*embodied in its history*). (Ahmad, 2010)

B. Militer

1. Definisi Militer

"Military" dalam bahasa Inggris berarti "tentara, tentara angkatan bersenjata". Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai prajurit atau prajurit angkatan bersenjata yang terdiri dari angkatan darat, laut, dan udara. Militer merupakan organisasi yang paling sering melayani kepentingan publik, dan tidak termasuk orang-orang yang menjadi tujuan organisasi. Tentara adalah profesi sukarela, karena setiap orang dapat dengan bebas memilih pekerjaan di dalamnya, tetapi juga wajib karena anggotanya tidak dapat secara bebas membentuk perkumpulan sukarela dan terbatas pada hierarki birokrasi. (Peter Balu, 1962)

2. Sejarah Militer di Indonesia

Sejarah politik militer Indonesia dibagi dalam empat periode waktu. Hal ini didasarkan pada momentum politik penting yang berimplikasi terhadap peranan militer dalam kehidupan politik Indonesia. Periode waktu tersebut adalah tahun 1945-1959, dimana pada kurun tersebut militer Indonesia lahir dan berkembang di tengah kancah revolusi mempertahankan kemerdekaan. Militer mencari bentuk dan posisinya yang tepat didalam kehidupan bernegara, yang relative baru, hingga diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang kemudian menempatkan militer pada posisi politik yang lebih diperhitungkan.

Periode 1959-1966, merupakan kurun waktu dimana pengaruh militer sebagai kekuatan politik menghadapi berbagai tantangan sekaligus ancaman terhadap eksistensinya. Dekade setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, yang ditandai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, semakin

memperkokoh peran politik militer yang dominan di panggung kekuasaan Indonesia.

Periode 1966-1998, merupakan kurun waktu yang cukup panjang bagi militer terlibat dalam kehidupan politik secara intens, hingga runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Sejak itu, peran politik militer secara nyata berangsur surut.

Kurun waktu 1998-2003, merupakan era reformasi nasional yang sedang berlangsung dimana militer tengah mereposisi perannya, menarik keterlibatannya secara langsung dalam kehidupan politik, serta mengumandangkan jargon profesionalisme militer, sebagai komitmen barunya untuk meninggalkan politik.

Periodisasi tersebut dimaksudkan untuk pemetaan umum sejarah politik militer sesuai dengan momentum politik dan dampaknya terhadap peran politik militer. Dengan pembatasan seperti itu, diharapkan dapat memudahkan kita memahami peristiwa dan fenomena yang menjadi benang merah dari kehidupan politik nasional sejak awal kelahiran republik hingga sekarang, dalam hal ini militer turut serta di dalamnya. (Chrisnandi, 2005)

3. Awal Keterlibatan Tentara Dalam Kelembagaan Politik

Atas dasar keadaan darurat perang maka pada 1957 Presiden Soekarno meminta Nasution menjadi mitra politiknya dengan menjadi *co-formateur* kabinet. Tujuan Soekarno adalah memperoleh dukungan tentara. Nasution bersedia, dengan syarat PKI tidak diikutkan dalam kabinet dan ada wakil militer yang menjadi anggota kabinet. Nasution juga mengusulkan dibentuknya

kementerian negara untuk urusan kerja sama sipil militer. Permintaan Nasution dipenuhi dalam kabinet Djuanda.

Perlu diketahui bahwa Indonesia sejak merdeka tidak mempunyai seorang pun anggota kabinet dari golongan militer. Baru pada kabinet Djuanda, antara 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959 terdapat tiga orang menteri dari militer yaitu Kolonel Nazir sebagai Menteri Pelayaran Laut, Kolonel Dr. Azis Saleh sebagai Menteri Kesehatan, dan Kolonel Suprayogi sebagai Menteri Negara Urusan Stabilitas Khusus. Sejak itu, TNI mulai menjadi kekuatan politik yang diakui secara sah, karena ada anggota yang menjabat dalam pemerintah di luar bidang militer. Ini juga bisa dipandang sebagai usaha Soekarno untuk meningkatkan kerja samanya dengan tentara.

Untuk melegitimasi keterlibatan tentara dalam urusan non militer itu, Nasution mengemukakan konsep "jalan tengah tentara" yang memberikan anggota militer tempat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara tetapi tidak mendominasi. Dalam model ini, militer tidak akan mengambil alih kekuasaan, tetapi akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan nasib negara. Pemecatan Nasution dari konstruksi nasional seperti membual bahwa gunung berapi akan meledak suatu hari nanti (Said, 2018). Karena itu perlu dibuka saluran-saluran dengan memberikan tempat bagi tentara untuk ikut serta dalam pembinaan negara. Demikian juga dalam Dewan Nasional Setelah melalui perdebatan panjang dari 19-21 November 1958 keanggotaan Dewan Nasional diperluas dengan diakuinya militer sebagai golongan fungsional. Golongan fungsional itu dimanfaatkan oleh tentara sebagai jalan untuk membawa tentara ke

pusat politik secara sah, tanpa menundukkan diri pada pengaruh partai-partai politik (Britton 1996: 93).

Persamaan beberapa pandangan antara Nasution dengan Soekarno, dan kepentingan Soekarno untuk mendapatkan dukungan dari tentara, memudahkan Nasution untuk mewujudkan gagasannya, apalagi dengan adanya wakil-wakil tentara di kabinet dan Dewan Nasional. Itu adalah pengakuan *de facto* dalam praktik pemerintahan di badan eksekutif. Nasution kemudian menemukan landasan *de jure* agar tentara dapat ikut serta sebagai anggota badan legislatif, yaitu mengikuti pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang menyebutkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan perundangan.

Dengan demikian, Nasution berpendapat UUD 1945 memberikan peluang tentara masuk dalam golongan tersebut sebagai golongan fungsional agar dapat menjamin sistem kenegaraan yang stabil. Nasution juga berpendapat, UUD 1945 dapat menghindarkan perselisihan ideologi, menjamin kemantapan kepemimpinan, di samping memberi landasan hukum tentara untuk ikut serta dalam mengurus negara sebagai golongan fungsional. Katanya :

“Dengan kembali ke UUD 45 terbukalah jalan guna membiru kemantapan cita-cita kemerdekaan semula guna mempersatukan kembali satuan-satuan perjuangan, dan guna mendasari politik pemulihan keamanan yang amat mendesak dewasa ini Kembali UUD

45 ini memungkinkan kemantapan ideologi dan kepemimpinan dan memungkinkan pemberian posisi formal bagi TNI sebagai “golongan” dalam kenegaraan”

Ketika terjadi perdebatan di sidang Konstituante, tentara menjadi pendukung aktif terhadap rencana Soekarno itu. Oleh sebab itu, ketika Konstituante menolak usul rencana itu karena ingin membuat UUD baru, Nasution meminta Soekarno mengeluarkan dekrit (Singh 2001: 351). Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945, di depan ribuan massa yang dikumpulkan atas inisiatif Nasution (Stanley Adi Prasetyo & Toriq Hadad 1998: 123). Dengan UUD 1945, berakhirilah sistem parlementer dan mulailah sistem presidensiil dengan demokrasi terpimpin. (Fattah, 2005)

4. Tentara Indonesia dan Politik

Uraian sebelum ini telah menunjukkan beberapa faktor mengapa tentara terlibat dalam politik antara lain adalah karena asal usul tentara yang berafiliasi kepada kekuatan politik tertentu kejengkelan tentara atas perilaku elite politik yang suka memojokkan dan mencampuri urusan internalnya, kondisi negara yang tidak stabil dan rendahnya prestasi pemerintah dan adanya niat tentara untuk ikut serta dalam lapangan politik dengan alasan mereka merasa mempunyai hak sejarah sebagai pejuang kemerdekaan yang berhasil dan berhak juga mengisi kemerdekaan negara dalam segala bidang pembangunan nasional.

Di samping itu, pengaruh politik terhadap tentara bermula sejak 1945, ketika Amir Syarifuddin menggunakan tentara untuk mencapai tujuan politiknya yang akhirnya terlihat pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Walaupun

pemberontakan tersebut dapat ditumpas oleh tentara yang setia pada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun peristiwa itu menunjukkan betapa Amir dan kawan-kawannya telah berhasil mempengaruhi tentara untuk campur tangan dalam politik. Selain itu, Tan Malaka dengan Persatuan Perjuangannya (PP) juga berhasil mempengaruhi Panglima Divisi III Yogyakarta Mayor Jenderal Soedarsono, untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Sjahrir yang sah tetapi gagal karena dipatahkan oleh Presiden Soekarno beserta pemimpin Republik yang lain termasuk tentara yang setia kepada pemerintah.

Pada masa pemerintahan parlementer pada tahun 1950 menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri yang berpandangan kiri melakukan campur tangan dalam urusan internal tentara dengan mengangkat orang-orang yang setia kepadanya tanpa koordinasi dengan KSAD, dengan tujuan menanamkan pengaruh politiknya di kalangan tentara. Kebijakan Iwa telah memecah belah tentara. Untuk menghindari perselisihan tentara yang berkelanjutan sejak peristiwa 17 Oktober 1952 diadakan sidang di Yogyakarta yang berhasil memadukan Angkatan Darat. Sidang tersebut juga memutuskan melarang tentara terlibat dalam kegiatan partai dan mengisi jabatan tinggi berdasarkan kemampuan dan senioritas.

Usaha memanfaatkan tentara untuk mendukung partai yang dilakukan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan partai PNI dengan mengangkat Bambang Utoyo yang relatif masih muda sebagai KSAD karena mempunyai ikatan dengan PNI. Pengangkatan itu dianggap berbau politik dan melanggar kesepakatan dalam tubuh Angkatan Darat di Yogyakarta. Akibatnya, jajaran Angkatan Darat memboikotnya yang dikenal dengan peristiwa 27 Juni 1955. Pada masa demokrasi

terpimpin tentara telah digunakan sebagai kekuatan politik pengimbang oleh Presiden Soekarno dalam usahanya membangun keseimbangan kekuatan antara TNI, PKI, dan Presiden Soekarno sendiri. Keseimbangan itu hancur ketika terjadi pemberontakan G30S/PKI tahun 1965. Pemberontakan tersebut mengakibatkan tentara ikut serta terpecah walaupun kelompok besar yang setia kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menumpas pemberontak.

Dalam demokrasi terpimpin TNI terjun lebih dalam ke percaturan politik ketika bersaing dan bertentangan dengan PKI. Untuk menghadapi PKI, ABRI mendirikan organisasi massa yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Ketika G30S/PKI berhasil ditumpas oleh ABRI muncullah Orde Baru Sekber Golkar kemudian menjadi Golkar. yang dijadikan tonggak politik Orde Baru dengan dukungan ABRI Dengan Ketetapan MPR (S) No. XXIV/MPR/1966, ABRI secara sah memiliki dwifungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. DPR pun memberi landasan dalam bentuk Undang-Undang No 16 Tahun 1969 dan Undang-Undang No 20 Tahun 1982.

Strategi Orde Baru yang mengedepankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menggunakan ABRI sebagai alat kekuasaan telah menempatkan ABRI pada posisi sentral dan mengambil tanggung jawab penuh atas semua persoalan kehidupan bangsa dan negara bersama dengan Golkar. Namun, sebenarnya kekuasaan berada di tangan Presiden Soeharto secara terpusat dan ABRI hanya digunakan sebagai alat saja untuk melestarikan kekuasaan Soeharto.

Format politik Orde Baru yang sentralistik di tangan Soeharto dan penggunaan pendekatan keamanan, perluasan dwifungsi ABRI dan otoritas birokrasi yang berlebihan serta rendahnya apresiasi terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum, telah menciptakan pemerintahan otoritarian yang tidak tertandingi dan tidak mengenal *check and balance*. Ini mengakibatkan tumbuhnya kekuasaan yang antikritik membatasi kebebasan politik rakyat munculnya depolitisasi, korporasi, de- mobilisasi, dan deparpolisasi, serta represi yang sering dengan kekerasan. Timbullah perasaan takut dan tertekan pada rakyat yang menghambat tumbuhnya civil society dan demokrasi.

Demokrasi dikumandangkan hanya sebagai slogan, karena kenyataannya rezim Orde Baru menghalangi partisipasi politik rakyat meniadakan persaingan politik dan kebebasan politik melarang perbedaan pendapat serta mencegah organisasi masyarakat yang pluralis. Padahal, inti demokrasi politik mempunyai tiga dimensi, yaitu kompetisi, partisipasi, kebebasan sipil dan politik.

Dominasi militer di segala bidang kehidupan itu telah mendapat kritik dan saran agar dikurangi, baik dari kalangan militer maupun dari luar militer tetapi tidak mendapat respons yang positif dari rezim Orde Baru. Malah, para pengkritik sering mendapat tekanan. Namun, kelompok prodemokrasi terus berjuang menuntut reformasi. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997 semakin membuat situasi tidak menentu, yang menciptakan krisis dalam bidang lainnya. Hal itu menyebabkan timbulnya gerakan massa yang besar, yang dipelopori oleh mahasiswa yang menuntut reformasi menyeluruh.

Pada awal gerakan reformasi, terjadi kerusuhan massa dan anarki, bahkan ada yang menyuarakan untuk melakukan revolusi. Sementara, krisis moneter mengakibatkan keterpurukan. Situasi tersebut sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Namun, ternyata proses pergantian pimpinan nasional dapat berlangsung aman dan reformasi dapat di kendalikan. Suka atau tidak suka, diakui atau tidak, kondisi itu tak lepas dari peran ABRI/ TNI dalam menyikapi dan ikut menangani serta mengawal masalah tersebut, karena sejak mula ABRI / TNI telah mendukung reformasi nasional dan juga melakukan reformasi internalnya. Dengan perumusan paradigma baru dan reformasi normalnya. TNI secara jujur mengakui kesilapannya pada masa lalu, kemudian bertekad memperbaiki diri demi menghadapi masa depan bangsa dan negara yang lebih maju dan modern.

TNI telah berhasil memantapkan paradigma barunya dengan program reformasi internal, yang implementasinya cukup banyak dan signifikan terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Capaian yang cukup signifikan itu menunjukkan kesungguhan TNI dalam melakukan perubahan menuju yang lebih baik, sesuai dengan tuntutan negara modern. Capaian yang sangat penting antara lain adalah keluarnya TNI dari peran sosial politik peniadaan dwifungsi TNI, menumpukan tugas sebagai alat pertahanan negara, sikap netral dalam politik, dengan paradigma baru dan reformasi internalnya, TNI telah berubah dari dominasi kehidupan politik menuju profesionalisme sebagai alat pertahanan negara, dan tidak berpolitik praktis. (Fattah, 2005)

5. Fungsi Militer

Fungsi militer dalam negara demokratis dapat kita lihat dari prinsip-prinsip yang ditawarkan oleh Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr. Dietrich Genschel. Prinsip-prinsip yang dimaksud, adalah sebagai berikut: (Genschel, 2002)

1. Militer merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif suatu tatakelola pemerintahan. Dengan demikian, militer merupakan elemen pemisahan kekuasaan dalam sistem politik yang demokratis, yang ditandai dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif;
2. Militer berada di bawah kepemimpinan politik yang telah disahkan secara demokratis, dengan jabatan menteri pertahanan dipegang oleh sipil;
3. Militer mengikuti pedoman politik yang digariskan;
4. Militer patuh dan tunduk pada hukum;
5. Militer dibatasi oleh tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh konstitusi; secara reguler menjaga keamanan eksternal negara (dari serangan atau ancaman dari luar) dan menjaga pertahanan negara. Dalam kasus-kasus tertentu dengan situasi dan batas-batas tertentu yang digariskan secara jelas. (Militer dapat dilibatkan) dalam upaya-upaya untuk menjaga keamanan internal negara dibawah komando polisi;
6. Militer bersifat netral dalam politik;
7. Militer tidak dibenarkan memiliki akses untuk memperoleh dukungan-dukungan keuangan diluar anggaran pendapatan dan belanja negara;

8. Militer dikendalikan oleh parlemen, kepemimpinan politik, kekuasaan kehakiman, dan masyarakat sipil secara umum;
9. Militer memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya dan dengan itu, memiliki harkat dan martabatnya.

C. Sipil

1. Definisi Sipil

Istilah sipil dalam bahasa Inggris “*civilian*” yakni (*person*) *not serving with armed forces*” (seseorang yang bekerja di luar profesi angkatan bersenjata), (Genschel, 2002). Diamond merumuskan, fungsi *civil society* dalam demokrasi yang penting dan paling mendasar adalah menyediakan landasan untuk membatasi kekuasaan negara, dengan mengawasi kegiatan dan dasar pemerintahan yang demokratis, serta mendemokratisasikan negara yang otoritarian.

Civil society juga merupakan alat utama untuk menciptakan kekuasaan yang demokratis dan mengawasi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Selain itu, fungsi *civil society* juga mendorong partisipasi politik masyarakat dan meningkatkan keterampilan berdemokrasi, serta memainkan peran penting untuk mengembangkan sikap dan perilaku demokratis, seperti toleransi, moderasi, kemauan melakukan kompromi, dan menghormati pendapat yang berbeda. Di samping itu, *civil society* juga dapat melakukan fungsi rekrutmen dan pendidikan politik bagi calon pemimpin, dan menyebarkan informasi untuk membantu masyarakat dalam mencapai dan mempertahankan kepentingannya. (Fattah, 2005)

2. Ragam Kendali Sipil

Peran militer di dalam masyarakat seringkali dibahas dalam ruang lingkup "kontrol sipil". Namun konsep ini tidak pernah didefinisikan secara memuaskan. Barangkali, kontrol sipil memiliki hubungan dengan kekuasaan relatif yang dimiliki kelompok sipil dan kelompok militer. Barangkali pula kontrol sipil dicapai pada batasan di mana kekuasaan kelompok militer dikurangi. Sebagai akibatnya, masalah mendasar dalam mendefinisikan kontrol sipil adalah: bagaimana kekuasaan militer dapat diminimalkan. Pada umumnya, terdapat dua ragam kendali sipil. (Huntington, 2003)

a. Kontrol Sipil Secara Subjektif (Memaksimalkan Kekuasaan Sipil)

Cara yang paling sederhana untuk meminimalkan kekuasaan militer tampak dalam memaksimalkan kekuasaan kelompok sipil dalam hubungannya dengan militer. Begitu banyak kepentingan kelompok sipil, dengan macam-macam karakteristik, dan konflik satu sama lain, sehingga bagaimanapun, menjadikannya tidak mungkin untuk memaksimalkan kekuasaan mereka sebagai suatu kesatuan yang utuh dibandingkan dengan kemiliteran. Sebagai akibatnya, memaksimalkan kekuasaan sipil selalu berarti memaksimalkan kekuasaan beberapa kelompok sipil tertentu. Hal ini merupakan kontrol sipil secara subjektif.

b. Kontrol Sipil Yang Objektif (Memaksimalkan Profesionalisme Militer)

Kontrol sipil di dalam artian objektif adalah memaksimalkan profesionalisme militer. Lebih tepatnya adalah pembagian kekuasaan politik di antara militer dan kelompok-kelompok sipil untuk menciptakan situasi kondusif bagi munculnya sikap dan perilaku profesional diantara para anggota korps perwira. Kontrol sipil

yang objektif, dengan demikian, menentang secara langsung kontrol sipil yang subjektif. Kontrol sipil yang subjektif mencapai tujuan akhirnya dengan mensipilkan pihak militer, menjadikan mereka cermin dari negara. Kontrol sipil yang objektif mencapai tujuan akhirnya dengan memiliterkan pihak militer, menjadikan mereka alat negara. (Huntington, 2003)

3. Keseimbangan Kendali Sipil Objektif

Pembagian kekuasaan antara kelompok sipil dan kelompok militer yang memaksimalkan profesionalisme militer dan kendali sipil yang objektif berbeda-beda tergantung pada kecocokan antara ideologi yang berlaku di dalam masyarakat dengan etika militer yang profesional. Jika ideologi tersebut sejak semula sudah bersifat antimiliter (seperti liberalisme fasisme, atau Marxisme), militer membutuhkan kekuasaan politik yang besar dengan jalan mengorbankan profesionalisme mereka dan mengikuti nilai-nilai dan sikap-sikap yang dominan di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam sebuah lingkungan masyarakat militer seperti itu, profesionalisme militer dan kontrol sipil dimaksimalkan dengan tindakan militer yang meninggalkan kekuasaan dan pengaruh menempati posisi yang lemah dan tertutup, terpisah dari kehidupan umum masyarakat.

Di dalam lingkungan masyarakat yang didominasi oleh sebuah ideologi yang sesuai dengan pandangan militer, sebaliknya, kekuasaan militer ditingkatkan hingga suatu batasan yang lebih besar tanpa mengorbankan profesionalisme yang tinggi. Realisasi kontrol sipil yang objektif dengan demikian tergantung pada pencapaian sebuah keseimbangan yang tepat antara kekuasaan militer dan ideologi masyarakat. (Huntington, 2003)

4. Membangun *civil society* Untuk Mendukung Pembangunan Demokrasi

Masyarakat sipil adalah sekumpulan masyarakat kewargaan yang memiliki kebebasan, egaliter, bertindak aktif, baik dalam pemikiran dan praktik dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di dalamnya terdapat kebebasan ke terbuka untuk berkumpul berserikat mengeluarkan pendapat serta adanya kesempatan yang sama dalam mempertahankan kepentingannya. *Civil society* harus memiliki kemandirian tidak tergantung pada negara, memiliki kemampuan bergerak dan kemampuan inisiatif, sehingga mampu mengawasi negara untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mengindahkan peraturan dan hukum yang berlaku, bersifat inklusif, dan menghargai kebebasan. (Chrisnandi, 2005)

Civil society memiliki peran yang besar dalam berhadapan dengan negara. Cirinya sangat berkaitan dengan demokrasi karenanya demokrasi bisa berkembang apabila terdapat *civil society*. Dengan kemandirian dan kematangan politiknya, maka masyarakat sipil akan memiliki kapasitas politik yang tinggi yang mampu menjadi kekuatan pengimbang dan mampu melakukan fungsi sebagai kekuatan yang kritis reflektif. Menurut Kusnanto Anggoro (1999. 21), *civil society* dapat memainkan peran yang sama pentingnya dengan *political society*, tetapi tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh *political society* Karena itu *Civil society* tidak sama dengan *political society*. Karena itu *civil society* merujuk pada sebuah wilayah interaksi sosial di antara *political Society* dan *economic society*.

Menurut Uhlin, ada tiga peran *civil society* dalam transisi menuju demokrasi. *Pertama*, dalam tahap pra transisi, aktor *civil society* memberi tekanan kepada rezim otoritarian dan berjuang untuk demokrasi. *Kedua*, setelah transisi dimulai, aktor *civil society* menempatkan aktor politik dalam sistem demokrasi, bermain dan berperan besar dalam mengakhiri kekuasaan otoritarian dan mendirikan institusi demokrasi. *Ketiga*, karakter *civil society* yang majemuk bisa mendukung demokratisasi. Kemajemukan itu bisa menyeimbangkan perbedaan kepentingan dan membuat kekuasaan tidak didominasi oleh suatu kelompok atau negara saja. Di Indonesia pada masa Orde Baru, NU dan Fordem tampaknya dapat berperan seperti itu. (Chrisnandi, 2005)

Sedangkan Boussard menyatakan bahwa ada perbedaan peran *civil society* pada masa transisi menuju demokrasi dengan pada masa konsolidasi demokrasi la berkata: "*During the democratic transition, civil society organisations are often active in the process of putting an end to the authoritarian rule and of inaugurating democracy*". Namun, *civil society* tidak bisa menjatuhkan rezim otoritarian dengan kekuatannya karena sumber kemampuannya yang tidak besar. Mereka menggunakan cara lain dengan menjatuhkan legitimasi rezim.

Peran *civil society* dalam masa konsolidasi demokrasi antara lain, ikut melakukan perubahan sosial ke arah demokrasi dan mengembangkan budaya politik partisipasi dalam masyarakat dengan melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban masyarakat. Boussard menitikberatkan kajiannya pada peran *civil society* sebagai sumber perubahan. *Civil society* merupakan dasar sosial dari demokrasi. Karena itu, berlangsungnya demokrasi juga bergantung pada kuat

tidaknya *civil society* dan budaya politik yang demokratis Kedua hal itu saling berpengaruh yang pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan demokrasi. Oleh sebab itulah, penanaman budaya demokrasi dan penguatan *civil society* merupakan strategi alternatif yang bisa digunakan dalam proses demokratisasi. (Chrisnandi, 2005)

D. Sistem Relasi Militer-Sipil

Relasi antara kekuasaan, profesionalisme, dan ideologi, yang pada dasarnya umumnya memunculkan lima tipe ideal relasi militer-sipil. Ini tentunya bersifat ideal dan sangat ekstrem. Didalam praktik nyatanya relasi militer-sipil dari lingkungan masyarakat sipil menggabungkan dua unsur atau lebih. Dari ketiga unsur tipe tersebut mungkin adanya tingkat profesionalisme yang tinggi dari kontrol sipil yang objektif. Kedua unsur yang lain ini memunculkan profesionalisme yang rendah dan kontrol sipil yang subjektif tersebut. (Huntington, 2003)

a. Ideologi antimiliter

Tipe hubungan militer-sipil seperti ini pada umumnya ditemukan di negara yang primitive. Pengeksporan institusi dan etika profesionalisme militer dari Eropa Barat ke negara-negara lainnya telah menjadi sama sulitnya dengan pengeksporan institusi demokrasi konstitusional.

Sebagai akibatnya, tipe hubungan militer-sipil seperti ini cenderung berlaku di negara-negara Asia dan Amerika Latin. Turki, meski dengan susah payah, berhasil memindahkan para perwira mereka dari politik dan membentuk perilaku dan pandangan yang profesional. Jepang merupakan satu-satunya negara

yang berhasil menjaga pola hubungan militer-sipil selama jangka waktu yang panjang. Bagaimanapun hal tersebut merupakan karakteristik Jerman selama Perang Dunia I dan Amerika Serikat di Perang Dunia II.

b. Ideologi antimiliter

Kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang rendah. Kombinasi ini hanya muncul ketika ideologi kemasyarakatan dikejar dengan begitu gigih sehingga tidak mungkin bagi pihak militer untuk lepas dari pengaruhnya, seberapa pun mereka mengurangi kekuasaan politik mereka. Hubungan militer-sipil di dalam negara totaliter modern mungkin cenderung seperti tipe ini, atau mirip dengan Jerman selama Perang Dunia II.

c. Ideologi antimiliter

Ideologi antimiliter seperti ini memiliki kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang tinggi. Masyarakat yang sedikit menerima ancaman bagi keamanannya sehingga cenderung memiliki tipe hubungan militer ini. Pola ini berlaku di Amerika Serikat sejak kebangkitan profesionalisme setelah perang sipil hingga awal Perang Dunia II.

d. Ideologi promiliter

Kekuasaan politik militer yang tinggi, dan profesionalisme militer yang tinggi. Suatu masyarakat yang menerima ancaman keamanan terus-menerus dan sebuah ideologi yang bersimpati pada nilai-nilai kemiliteran memberi jalan untuk suatu tingkatan kekuasaan militer yang tinggi dan kontrol sipil yang objektif. Prussia dan Jerman selama era Bismarck-Motlke (1860-1990) mencapai kondisi seperti ini.

e. Ideologi antimiliter

Didalam tipe ini kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang tinggi. Tipe ini berada di dalam masyarakat yang relatif aman dari ancaman keamanan yang didominasi oleh suatu ideologi lainnya. Hubungan militer-sipil di Inggris pada abad kedua puluh, pada batasan tertentu, merupakan wujud pola hubungan seperti ini.

E. Tingkatan Hubungan Militer-Sipil

Pada tingkatan kekuasaan, hal yang utama adalah kekuasaan korps perwira di tengah-tengah kelompok-kelompok sipil di dalam masyarakat. Pada tingkatan ideologi, hal utamanya adalah kecocokan etika militer profesional dengan ideologi politik yang ada di dalam masyarakat. Di satu pihak, kriteria diperlukan untuk mengukur kekuasaan militer dan sipil. Sebaliknya, perhatian juga diperlukan menyangkut kesesuaian etika militer profesional pandangan politik yang beragam. Tingkatan hubungan militer-sipil terbagi menjadi dua antara lain: (Huntington, 2003)

1. Korps Perwira dan Kekuasaan Politik

Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain. Sebuah hubungan kekuasaan memiliki setidaknya dua dimensi tingkatan atau banyaknya kekuasaan. *Pertama*, yaitu sejauh mana perilaku tertentu dari seseorang dikendalikan oleh orang lain. *Kedua*, ruang lingkup atau tempat kekuasaan, yaitu jenis perilaku yang dipengaruhi oleh individu atau kelompok lainnya. Kekuasaan memiliki dua bentuk, otoritas formal dan pengaruh informal, keduanya bisa diukur berdasarkan tingkatan dan ruang lingkup. Otoritas formal

melibatkan kendali seseorang atau perilaku orang lain berdasarkan posisi masing-masing di dalam struktur sosial tertentu.

Penggunaan otoritas mengandung sanksi konstitusi, undang-undang, peraturan, ketetapan, atau kebiasaan yang diterima sudah sejak lama. Hal tersebut merupakan kebenaran politik yang tak dapat disangkal, di mana otoritas formal hanya menyatakan sebagian kisah mengenai kekuasaan. Hubungan-hubungan informal juga ada di mana seseorang, atau sekelompok orang mengawasi perilaku orang lain bukan karena mereka menduduki posisi tertentu di dalam suatu struktur formal melainkan karena mereka mengendalikan sanksi-sanksi atau penghargaan lainnya. Karakteristik yang membedakannya adalah otoritas tersebut tidak terletak di dalam peran atau status yang diduduki oleh individu atau kelompok tersebut, tetapi ada dalam diri individu.

Otoritas. Dalam menganalisis pola otoritas di dalam hubungan militer-sipil, yang menjadi kriteria adalah tingkatan relatif, kesatuan yang relatif dan ruang lingkup kekuasaan yang relatif kelompok militer dan kelompok sipil. Semakin tinggi tingkat otoritas sebuah kelompok, semakin besar kesatuan strukturnya, semakin luas pula ruang lingkup otoritasnya, maka semakin berkuasa pula nantinya. Tingkat otoritas korps perwira ada pada posisi maksimal jika ia ditempatkan pada puncak hierarki, antara institusi pemerintah lainnya berada di bawahnya, atau dengan kata lain, ketika ia atau pemimpinnya menjalankan kedaulatan kekuasaan militer. Empat indeks sederhana, yang bisa digunakan dalam menilai pengaruh korps perwira adalah:

- a. Afiliasi kelompok korps perwira dan para pemimpinnya. Salah satu ukuran pengaruh dari sebuah kelompok adalah besar dan sifat afiliasinya dengan kelompok-kelompok yang berkuasa lainnya. Bagi korps perwira, afiliasi ini pada umumnya terdiri dari tiga jenis. *Pertama*, afiliasi prakedinasan yang timbul dari berbagai kegiatan para perwira sebelum mereka memasuki korps perwira. *Kedua*, para perwira mungkin mengembangkan afiliasi kedinasan dalam bidang tugas kemiliteran mereka, afiliasi pascakedinasan yang mencerminkan sebuah pola umum kegiatan perwira setelah meninggalkan korps;
- b. Sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia tergantung pada otoritas korps perwira dan para pemimpinnya. Semakin besar proporsi produk nasional yang diarahkan pada tujuan kemiliteran. Dan semakin besar jumlah individu yang berkecimpung dalam angkatan bersenjata, baik dalam kapasitas sebagai seorang sipil atau militer maka semakin besar pula pengaruh korps perwira dan para pemimpinnya;
- c. Penyatuan hierarki korps perwira dan kelompok lainnya. Pengaruh militer meningkat jika para anggota korps perwira mengambil jabatan di dalam struktur kekuasaan nonmiliter;
- d. Prestise dan ketenaran korps perwira dan para pemimpinnya. Posisi korps perwira dan para pemimpinnya di tengah pendapat umum dan sikap sebagian besar kelompok-kelompok di dalam masyarakat mengenai kemiliteran merupakan unsur utama dalam menentukan pengaruh militer.

Keempat faktor ini akan membantu memberikan gambaran mengenai pengaruh politik militer. Semakin banyak atau semakin sedikit jumlah hubungan ini menandakan pengaruh tingkat politik militer.

2. Etika Profesional dan Ideologi Politik

Sama halnya dengan keanekaragaman kelompok sipil yang terlibat di dalam pergumulan akan kekuasaan, terdapat pula keanekaragaman etika sipil atau ideologi. Etika militer bersifat konkrit, permanen, dan universal. Kata "sipil" sebaliknya, hanya mengacu pada hal-hal yang non-militer. Tidak ada pemisahan antara pemikiran militer dan pemikiran sipil, karena tidak ada pemikiran sipil yang tunggal. Perbedaan antara dua etika sipil mungkin lebih besar dan perbedaan antara salah satu etika sipil dan etika militer. (Huntington, 2003)

Analisis ini akan membandingkan etika militer dengan empat perwujudan dari satu jenis etika sipil, yaitu ideologi politik. Sebuah ideologi politik merupakan suatu susunan nilai dan sikap yang berorientasi menghadapi masalah-masalah negara. Ada empat ideologi yang akan dibandingkan dengan etika militer, dan keempatnya merupakan hal yang paling penting di dalam kebudayaan barat liberalisme, fasisme, Marxisme, dan konservatisme. Dalam hal ini adalah batasan di mana ideologi dipandang sebagai suatu sistem pemikiran yang cocok atau bertentangan dengan etika militer.

Liberalisme. Hakikat liberalisme adalah individualisme. Ia menekankan pemikiran dan martabat moral seorang individu dan menentang penghalang politik, ekonomi, dan sosial terhadap kebebasan individu. Sebaliknya, etika militer berpandangan bahwa manusia itu jahat, lemah, dan tidak masuk akal dan

bahwa ia harus berada di bawah suatu kelompok. Seorang militer menyatakan bahwa hubungan alami di antara manusia merupakan konflik, kaum liberal mempercayai bahwa hubungan alami tersebut bersifat damai. Liberalisme berpandangan bahwa penerapan pemikiran akan menghasilkan suatu kepentingan yang harmonis. Kaum liberal biasanya mempercayai kemajuan dan meminimalkan permasalahan politik dengan berkonsultasi dengan pemikirannya dan bukan dengan meneliti pengalamannya. Liberalisme pada umumnya memusuhi alat-alat perang dan angkatan bersenjata yang telah siap siaga. Kontrol sipil dalam pandangan liberalisme berarti perwujudan pemikiran liberal di dalam institusi kemiliteran. Para militer profesional diyakini tertinggal, tidak memiliki kemampuan, dan melalaikan pentingnya perekonomian, moral, dan ideologi. (Huntington, 2003)

Fasisme. Etika militer dan fasisme serupa dalam beberapa hal, tetapi memiliki satu perbedaan mendasar. Etika militer mengenal pentingnya kepemimpinan dan disiplin di dalam lingkungan masyarakat, fasisme menekankan kekuasaan dan kemampuan tertinggi dari pemimpin, dan bawahan mutlak harus melaksanakan kehendaknya. Kaum fasis dan militer memandang sifat manusia dan sejarah dengan sangat berbeda. Kaum fasis justru mempercayai sifat terbaik dari seseorang atau ras pilihan dan sifat jenius dan kebenaran tertinggi yang melekat pada pemimpin. Jika seorang militer belajar dari sejarah dan kaum liberal bersandar pada logika kaum fasis justru menekankan intuisi. Dalam hal ini fasisme lebih bersifat individualistis dari pada liberalisme dan lebih jauh dari etika militer yang menekankan pada keterbatasan sifat manusia. Tidak seperti liberalisme,

fasisme bersedia mendukung pertahanan kekuatan militer yang kuat. Kaum fasis mempercayai kepatuhan internal dari seluruh institusi sosial kepada negara atau partai. Seperti liberalisme, fasisme pun mempercayai perang total, angkatan bersenjata asal, dan adalah tugas setiap warga negara untuk menjadi seorang tentara. (Huntington, 2003)

Marxisme. Pandangan kaum Marxis mengenai manusia pada dasarnya bertentangan dengan pandangan kaum militer mengenai manusia. Bagi kaum Marxis, manusia pada dasarnya baik dan rasional ia dirusak oleh institusi-institusi yang jahat. Meskipun pemikiran kaum Marxis menyangkal perbedaan mendasar antara manusia, pada perjalanan sejarah saat ini, kaum fasis memandang proletar sebagai kelas yang lebih maju dibandingkan kelas lainnya. Jika seorang militer mengenal pentingnya kesempatan dan kebebasan manusia di dalam sejarah maka kaum Marxis berpandangan bahwa segala peristiwa yang penting ditentukan oleh kekuatan perekonomian. Etika kaum Marxis dan militer sama-sama mengenal pentingnya kekuasaan dan kelompok di dalam kehidupan manusia. Marxisme menyangkal realita bahwa negara adalah sebuah cerminan kesatuan kelompok. Ia berpandangan bahwa negara hanya sekadar alat perang antar kelas. Etika militer berpandangan bahwa negara-negara berperang karena berbagai macam alasan Etika militer menekankan perhatian pada kekuasaan dan keamanan. Bagi kaum Marxis, imperialisme perekonomian merupakan dasar perang antar negara. Oleh karena itu, seperti liberalisme, Marxisme membuat pola institusi militer dengan dasar pemikiran nonmiliter. (Huntington, 2003)

Konservatisme. Tidak seperti liberalisme, Marxisme, dan fasisme. Konservatisme pada dasarnya serupa dengan etika militer. Bahkan tepat untuk dikatakan bahwa etika militer adalah salah satu realisme konservatif. Hal yang terpenting, konservatisme, tidak seperti ketiga ideologi lainnya, tidak bersifat monistis dan universal. Ia mengizinkan suatu keanekaragaman tujuan dan nilai. Sebagai akibatnya, konservatisme merupakan satu-satunya dari keempat ideologi yang berdasarkan pada logikanya sendiri, tidak bertentangan dengan nilai-nilai militer yang berasal dari tuntutan fungsi kemiliteran. Etika militer bertentangan dengan liberalisme, fasisme, dan Marxisme. Sementara dalam konservatisme justru ada kesamaan dan kecocokan dengan etika militer. (Huntington, 2003)

BAB III

RIWAYAT HIDUP DAN DINAMIKA POLITIK

K. H ABDURRAHMAN WAHID

A. Riwayat Hidup Dan Silsilah K. H Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan K.H. Wahid Hasyim dan Solichah yang lahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. Abdurrahman Wahid berasal dan dibesarkan di pesantren dan perpolitikan. Abdurrahman Wahid lahir dalam keluarga yang sangat terhormat di komunitas muslim Jawa Timur. Kakeknya dari sang ayah yaitu K.H. Hasyim Asyari merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya dari sang ibu yaitu K.H. Bisri Syansuri merupakan pengajar di pesantren pertama yang mengajar kelas pada perempuan. Sang ayah yaitu K.H. Wahid Hasyim merupakan Menteri Agama pada tahun 1949 dan sang ibu merupakan putri dari pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang. Abdurrahman Wahid merupakan Ketua Umum NU tahun 1984-1999 dan memulai karir politiknya sebagai Anggota MPR dari partai Golkar yang berlanjut pada terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-empat. (Greg Berton, 2000-2001)

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah seorang intelektual Indonesia yang menonjol dan sangat disegani. Tokoh yang sudah lebih dari 15 tahun menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU), organisasi kaum tradisional, ini sering menghiasi halaman-halaman koran. Di luar pemerintah dan figur militer hal ini sangat sulit dibayangkan. Selama tahun-tahun

kepemimpinan itu popularitasnya mengalami pasang dan surut, yang biasanya berkaitan dengan manuver politiknya dan juga yang tidak boleh dilupakan- tingkat pemahaman terhadap manuvernya. Dalam beberapa tahun terakhir Abdurrahman menjadi semakin kontroversial, ketika dia berusaha meleraikan pihak-pihak yang terlibat kekerasan, juga ketika dia berusaha menyeberangi badai dan gelombang besar pada akhir pemerintahan Soeharto dan era Indonesia pasca Soeharto. Kendati demikian, Abdurrahman tetap dan bahkan semakin populer, sebagai figur karismatik dan tokoh yang selalu memberi cinta bahkan pada orang yang mengkritiknya atau para penentangannya. (Greg Berton, 2000-2001)

Gus Dur memulai kehidupan politiknya sekitar awal 1980-an, secara terbuka. Gus Dur menawarkan ide-ide pluralisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain. Dengan perannya yang dimilikinya di berbagai bidang, kiai, politisi, intelektual, budayawan, dan mantan Presiden. Kiprah politiknya sendiri semakin menjulang ketika secara tegas ia terjun ke dunia politik praktis dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Soim, 2018)

Gus Dur melakukan gerakan politik memang diakui oleh semua orang. Jabatan Presiden yang diraihinya menjadi prestasi terbesar yang diraihinya. Pemikiran dan perilaku politik Gus Dur dapat dinilai menjadi khazanah bagi dinamika perpolitikan di Indonesia. Gaya politik yang “nyeleneh” dari sosok Gus Dur menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik yang khas ketika melakukan interaksi politik. Gaya tersebut dipandang oleh sebagian ahli politik tentang NU sebagai bentuk anomali. Gus Dur memiliki keunikan tersendiri, yang juga kelebihannya, sebagai daya tawar dihadapan aktor politiknya. Salah satunya yang

patut kita contoh dalam sejarah pemikiran politik adalah kemampuannya membangun intelektualisme dan aktivisme sekaligus, yang jarang dilakukan oleh para kiai di lingkungannya. Berjuang melalui politik praktis dan diiringi dengan perlawanan terhadap “kebodohan” politik itu sendiri dengan intelektualismenya, merupakan gaya dari Gus Dur. (Soim, 2018)

B. Dinamika Politik K. H Abdurrahman Wahid

Sejak lahirnya behavioralisme, kajian tentang pemikiran politik mulai meredup. Karena itu, kajian ini berusaha mengembalikan semangat kajian pemikiran politik ke dalam ilmu politik. Gus Dur sebagai seorang tokoh politik yang dianggap fenomenal dalam sejarah pemikiran politik Indonesia, saat ini dijadikan objek penelitian. Pilihan itu didasarkan pada kenyataan Gus Dur sendiri, di dalam dirinya terangkum berbagai predikat, kiai, politisi, intelektual, budayawan, mantan presiden, dan aktivis kemanusiaan. Kiprah politiknya sendiri semakin menjulang ketika secara tegas ia terjun ke dunia politik praktis dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga mencapai puncaknya pada 1999-2001, saat menjadi Presiden Indonesia ke-4.

Kelihaian Gus Dur melakukan gerakan politik memang diakui oleh kawan ataupun lawan. Jabatan presiden yang diraihnya menjadi ukuran prestasi tersebut. Bagi sarjana politik, pemikiran dan perilaku politik Gus Dur dinilai dapat menjadi khazanah bagi dinamika pemikiran politik di Indonesia. Gaya politik yang "nyeleneh" dari sosok Gus Dur menunjukkan adanya tipikal pemikiran politik yang khas ketika melakukan interaksi dan advokasi politik. Gaya tersebut dipandang oleh sebagian ahli politik tentang NU sebagai bentuk anomali. Artinya,

Gus Dur memiliki keunikan tersendiri, yang juga kelebihanannya, sebagai daya tawar di hadapan lawan-lawan politiknya.

Salah satunya yang patut diperhitungkan dalam sejarah pemikiran politik adalah kemampuannya membangun intelektualisme dan aktivisme sekaligus, yang jarang dilakukan para kiai di lingkungannya. Berjuang melalui politik praktis diiringi dengan perlawanan terhadap kebodohan politik itu sendiri dengan intelektualismenya merupakan gaya Gus Dur. Latar belakang itulah yang mengundang banyak orang untuk mengetahui Gus Dur lebih jauh, termasuk penulis. Sebagai seorang pemikir, Gus Dur mampu merepresentasikan ide-idenya secara produktif melalui tulisan-tulisan pendek.

1. Proses Terpilihnya K. H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI ke-4

Dari tahun 1999 hingga 2004, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tidak dipilih langsung oleh rakyat, ada dua presiden dalam satu periode. Sebelum pemilihan presiden MPR 1999, dua partai utama DPR, Megawati Soekarnoputri (PDIP) dan BJ Habibie (Partai Golkar) mengajukan dua calon presiden. Namun, sebagai calon presiden, Habibie mendapat tentangan keras dari dalam Partai Progresif Demokratik dan bahkan dari dalam Partai Golkar, karena Habibie dianggap bagian dari orde baru. Karena itu, Majelis Umum (SU) PBB menolak peran Habibie sebagai presiden. MPR. Dia akhirnya mundur dari pemilihan presiden. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Berbeda dengan Habibie, Megawati merupakan calon kuat dalam pemilihan presiden karena dia adalah seorang reformis yang diusung oleh partai pemenang pemilihan umum 1999. Namun, sikap diam Megawati dan optimisme yang berlebihan untuk tidak mundur dari aliansi hanya akan mempersulit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mendapatkan 153 kursi presiden. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang secara terbuka menyatakan dukungannya dan membentuk koalisi untuk mendukung pemilihan presiden Megawati. PKB mendukung Megawati untuk mencegah Habibie yang diyakini mewarisi kekuasaan Orde Baru.

Tidak hanya diam menjadi masalah, PDIP juga dianggap sebagai partai nasionalis yang mengkhawatirkan partai-partai agama. Dari 153 kursi yang dimenangkan PDIP pada Pemilu 1999, 57 kursi atau 37,25% diisi oleh calon non-Muslim. Dalam sejarah politik masa lalu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga pernah disinyalir tidak bersahabat dengan keinginan umat Islam, termasuk mendukung UU Perkawinan 1973, dan menolak keras UU Sisdiknas PDI dan Pengadilan Agama Hukum 1989. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Aliansi Lisan dan informal, dan mempromosikan calon presiden alternatif. Poros tengah kemudian setuju untuk memenangkan PKB sebagai partai berbasis Islam dengan mencalonkan Abdullahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden inti. Pencalonan poros tengah bisa gagal karena PKB sudah berjanji mendukung Megawati. Selain itu, dari sisi sejarah dan politik, kerjasama antara PKB berbasis Nahdlatul Ulama (NU) dan poros berbasis Islam modern tidak pernah mulus. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Pada dasarnya, karena pemilihan mantan Ketua MPR, aliansi PK dan PAN dapat mendukung hingga 305 suara, dan 650 suara berasal dari aliansi PK, PAN dan MPR. Sementara itu, Matori Abdul Djali yang dicalonkan PKB dan didukung PDIP hanya mendapat 279 suara. Saat itu, dinilai partai Islam dan Golkar sudah mulai mendekati warna kombinasi kemenangan. Hal ini dianggap sebagai tawar menawar antara partai Islam dan Golkar untuk menduduki posisi kepemimpinan DPR dan MPR.

Sebelum memilih Amien Rais sebagai calon MPR dan Ketua Zhongsha, Zhongsha dan Partai Golkar banyak melakukan tawar menawar. Awalnya, pertemuan antara Hamzah Haz Amien Rais dan Akbar Tandjung menyepakati Golkar akan mendukung golongan bawah dan mengangkat Hamzah Haz sebagai Ketua MPR.

Namun, sebelum rapat paripurna ketiga dengan agenda pembentukan fraksi, kesepakatan menjadi tidak stabil karena para pihak meragukan komitmen pihak lain. Usai rapat paripurna ketiga, sebelum rapat paripurna keempat, Amiens, Hamzah dan Akbar kembali bertemu. Negosiasi hasil pertemuan ini dengan Gus Dur. Gus Dur setuju bahwa Amien akan menjadi ketua MPR, Akbar Tandjung akan menjadi ketua DPR, dan Hamzah Haz akan menjadi wakil ketua DPR. Mengingat Akbar Tandjung akan diangkat sebagai Wakil Presiden dan Hamzah Haz akan menjadi Ketua DPR, posisi awal ini dimungkinkan. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Dulu, sebenarnya Golkar setuju dengan PKB dan PDIP untuk mendukung Matori Abdul Djali sebagai Ketua MPR. PDIP sepakat Matori menjadi ketua MPR dan Golkar menjadi ketua DPR. Namun, kesepakatan ini tampaknya terguncang dengan munculnya kesepakatan antara Bottom Line dan Gorka. Pada akhirnya, Akbar Tandjung meraih 411 suara dan 491 anggota Partai Demokrat yang hadir atas dukungan Poros Tengah, serta merebut kursi ketua umum Partai Demokrat. Sejak terpilihnya MPR dan Ketua DPR, peran GUS DUR dalam GUS DUR bahkan turut serta dalam kesediaan menjadi ketua MPR dan menentang dukungan PKB terhadap pencalonan Matori. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Gus Dur menyetujui pencalonan presiden Poros Tengah sejak awal, meski tidak mendapat dukungan dari PKB. Ketua PKB Matori Abdul Djali dan beberapa anggota DPR dan PKB menyatakan tetap mendukung Megawati.

Sejak pemilihan ketua MPR dan DPR, peran Gus Dur telah terlihat Gus Dur bahkan turut serta dalam membuat skenario kemenangan Amien Rais sebagai ketua MPR dan berlawanan dengan dukungan pencalonan PKB kepada Matori. Oleh karena itu, bukan hal yang mengagetkan ketika Gus Dur menyetujui pencalonan dirinya sebagai presiden oleh Poros Tengah sejak awal, meski tidak didukung oleh PKB Hingga menjelang proses pemilihan presiden PKB terpecah menjadi dua kubu, yakni kubu yang mendukung dan kubu yang menolak pencalonan Gus Dur. Ketua Umum PKB Matori Abdul Djali dan beberapa anggota DPR dan PKB menyatakan tetap mendukung meski PKB terbelah saat pemilu, akhirnya setuju dengan Gus Dur. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Pemilihan presiden SU MPR 1999 akhirnya jatuh pada kemenangan Gus Dur sebagai presiden. Banyak pihak yang percaya bahwa pemilihan presiden DPP dan DPP adalah awal dari kompromi politik antara Axis dan Gorka, yang memungkinkan Gorka akhirnya mendukung Gus Toure sebagai presiden. Oleh karena itu, Poros Tengah berhasil memenangkan suara Gorkar dan menjadi partai terbesar kedua di Republik Demokratik. Tabel 3.1 menunjukkan jumlah suara dan perkiraan sumber dukungan Gus Dur dan Megawati Soekarnoputi dalam SU MPR 1999.

Sebenarnya ada lebih dari satu, tapi hanya pihak PKB yang mengajukan nama Megawati sebagai calon wakil presiden. Megawati kemudian terpilih sebagai wakil presiden setelah memenangkan 396 suara di MPR mengalahkan Hamzah Haz yang mendapat dukungan 284 suara Kolaborasi Gus Dur dengan Megawati banyak dipuji karena dinilai cocok menjadi kolaborasi yang mewakili mitra Islam dan kelompok nasionalis. Namun, penggunaan ekstensif kekuasaan pengawasan parlemen menyebabkan Abdurrahman menjadi presiden hampir dua tahun kemudian. Situasi ini menyebabkan pengangkatan Wakil Presiden Megawati sebagai presiden keempat pada Juli 2001. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Tabel 3.1 Hasil Pemilihan dan Perkiraan Sumber Dukungan Calon Presiden dalam SU MPR 1999

No	Pilihan	Perolehan Suara	Perkiraan Sumber Dukungan	
			Partai/Fraksi	Suara
1.	Abdurrahman Wahid	373	Golkar	100
			PPP	57
			PKB	51
			PAN	35
			PBB	12
			PK	6
			Partai Islam Lain	10
			Utusan Daerah	57
			Utusan Golongan	15
			TNI/Polri (Militer)	30
2.	Megawati Soekarnoputri	313	PDIP	154
			Utusan Golongan	69
			Utusan Daerah	50
			Golkar	20
			Partai Nasionalis Lain	17
			TNI/Polri	3
3.	Abstain	5	TNI/Polri	5

Sumber: (Wawan Ichwanuddin, 2014)

2. Pembentukan Kabinet Pada Masa Pemerintahan K. H Abdurrahman Wahid

Proses memenangkan pemilihan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di MPR menggambarkan permainan aliansi politik yang sangat menarik yang dijalankan oleh poros tengah. Eksis Tengah sukses meluncurkan partai lain termasuk PKB dan Golkar, membuat kemenangan Gus Dur sukses. Sebaliknya, Gus Dur harus melakukan kompromi politik dengan pimpinan partai dan TNI/Polri. Gus Dur mengakui Amien Rais, Akbar Tandjung, Megawati, dan Wiranto ikut serta dalam penyusunan kabinet pemerintahannya. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Kabinet yang dibentuk oleh Gus Dur untuk membantunya sebagai presiden diprakarsai oleh beberapa aktor politik. Pembentukan Kabinet Menteri hakikatnya adalah kekuasaan dan hak prerogatif Presiden. Pada 26 Oktober 1999, Gus Dur akhirnya mengumumkan hasil kompromi politik ini. Ke-35 anggota, 30 menteri atau 86% Kabinet Persatuan Bangsa yang merupakan usulan bersama Gus Dur dan Megawati, Amien Rais, Wiranto dan Akbar Tandjung. Di antara nama-nama yang direkomendasikan para politisi tersebut, 26 menteri berlatar belakang partai, dan 4 menteri di kalangan profesional atau birokrasi. Secara keseluruhan, menteri dari ahli di bidang atau jabatan hanya menyumbang 26% atau 9 kursi menteri.

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, Gus Dur sebagai presiden paling banyak merekomendasikan menteri terpilih di kabinetnya, perbedaan antara Amien Rice dan Wiranto hanya pada nama menteri dan rekomendasi masuk kabinet.

Banyaknya usulan yang diajukan Gus Dur di kabinet menteri. Ini menunjukkan bahwa Amien Rais dan Wiranto memiliki posisi yang sangat berpengaruh dalam menentukan pemilihan menteri kabinet persatuan bangsa. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Megawati seharusnya memiliki pengaruh yang lebih besar sebagai wakil presiden, karena dia adalah anggota kerja dari pemerintah Gus Dur dan hanya bisa membawa empat kursi atau sekitar 13% di kabinet menteri. Meski porsi Megawati dalam menentukan nama menteri lebih rendah dari Amien Rais, Wiranto dan Gus Dur, jumlah menteri dari PDIP dan PDIP adalah yang terbesar, yakni 5 menteri. Sejak Gus Dur menjabat sebagai presiden atas dasar Partai Islam, PKB memiliki banyak menteri. Pada saat yang sama, PAN meraih empat kursi menteri karena posisi Amien Rais sebagai promotor poros tengah saat Gus Dur dicalonkan. TNI dianugerahi jabatan menteri enam kursi yang cukup tinggi karena merupakan jabatan penting dalam mendukung terpilihnya Gus Dur pada Musyawarah Rakyat 1999.

Tabel 3.2 Susunan Menteri Kabinet Persatuan Nasional Berdasarkan Pemberi Rekomendasi dan Latar Belakang

Pemberi Rekomendasi	Latar Belakang Menteri Yang di Rekomendasikan	Nama Menteri/Jabatan Menteri
Abdurrahman Wahid (8 Menteri)	PPP = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Hamzah Haz/Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan; • Zarkasih Nur/Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah
	PKB = 4	<ul style="list-style-type: none"> • Alwi Shihab/Menteri Luar Negeri • Muhammad Tolchah/Menteri Agama • Ali Rahman/Sekretaris Negara • Khofifah Indar Parawansa/Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
	Profesional = 2	<ul style="list-style-type: none"> • AS Hikam/Menteri Negara Riset dan Teknologi • Sarwono Kusumaatmadja/Menteri Eksplorasi Laut

Sumber: (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Susunan kabinet sangat penting bagi Gus Dur, bukan hanya karena ia menjabat sebagai asisten presiden, tetapi juga karena susunan kabinet kemudian

menimbulkan banyak masalah bagi Gus Dur. Presiden ketiga Indonesia diberikan dua hak angket untuk masalah menteri. Selanjutnya Gus Dur diperiksa DPR melalui hak angket, di antaranya pertama, Gus Dur diperiksa karena batalnya Kementerian Penerangan dan Kementerian Sosial dalam kabinetnya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan hak angket tak lama setelah Gus Dur mengumumkan kabinetnya pada November 1999. Kedua, Gus Dur diberikan hak bertanya karena mencopot Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi dari kabinet. (Wawan Ichwanuddin, 2014)

Menyusun Kabinet Persatuan Nasional, adanya pertimbangan kompromi politik yang lebih tinggi ketimbang pertimbangan yang profesional. Sehingga kabinet ini lahir di era krisis yang sangat multi dimensi. Kabinet ini diharapkan untuk menjadi kabinet yang pertama dalam membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif. (Thoha, 2011)

3. TNI di Bawah Kepemimpinan K. H Abdurrahman Wahid

Mengawali pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pengangkatan sejumlah perwira tinggi di lingkungan Mabes ABRI dan Mabes Angkatan Darat yang dianggap militer tidak sesuai dengan keputusan Wanjakti (Dewan Jabatan-kepengangkatan Tinggi) serta bukan merupakan rekomendasi pimpinan ABRI, menyebabkan renggangnya hubungan Presiden dengan Angkatan Darat. Naiknya Jenderal Tyasno Sudarto menjadi KSAD (Kepala Staf TNI AD), November 1999 dan Letjen Agus Wirahadikusumah menjadi Pangkostrad Februari 2000, yang diikuti dengan sejumlah pergeseran jabatan struktur organisasi militer menimbulkan ketidakpuasan di kalangan perwira AD. Para perwira menuduh hal

ini merupakan intervensi Presiden Abdurrahman Wahid ke dalam urusan militer, yang seharusnya tidak dilakukan. (Chrisnandi, 2005)

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001), Panglima TNI dipegang oleh Laksamana Widodo AS yang menggantikan Jenderal Wiranto. Widodo AS sebelumnya menjabat Wakil Panglima TNI, yang berasal dari angkatan laut. Begitupun jabatan Menteri Pertahanan Keamanan, yang sebelumnya dijabat rangkap oleh jenderal Wiranto, diserahkan kepada Prof Dr Juwono Sudarsono, dari kalangan sipil, yang sebelumnya menjadi Menteri Pendidikan Presiden Soeharto, panglima TNI maupun Menhankam senantiasa berasal dari kalangan militer, khususnya TNI-AD. Naiknya Laksamana Widodo AS ke tampuk pimpinan tertinggi militer dan pengangkatan Prof Dr Juwono Sudarsono selaku Menhankam disebut-sebut berbagai pihak sebagai kemampuan Presiden Abdurrahman Wahid menepiskan dominasi TNI-AD (militer), sekaligus dianggap sebagai indikator keberhasilan supremasi sipil.

Lepasnya kendali pemerintahan sipil yang dipimpin presiden Abdurrahman Wahid atas militer, dapat dilihat dari beberapa sebab. *Pertama*, kurangnya keluasan akar hubungan yang kuat antara Presiden Abdurrahman Wahid dan para perwira senior yang memegang posisi strategis baik di Mabes TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kodam, maupun kepolisian. *Kedua*, lemahnya dukungan politik riil dari kekuatan partai-partai politik kepada Presiden Abdurrahman Wahid setelah tindakan kontroversi pemberhentian beberapa menteri yang berasal dari partai politik.

Dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid atas penyimpangan dana Bulog dan hadiah Sultan Brunei semakin menurunkan popularitas dan dukungan masyarakat kepadanya. Dengan melemahnya dukungan politik dari kekuatan politik sipil lainnya, Presiden Abdurrahman Wahid kehilangan kewibawaannya untuk mengendalikan militer yang tidak lagi menaruh hormat kepadanya. Ketiga adalah persepsi yang seragam dari kalangan militer yang menilai bahwa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid tidak memberikan manfaat bagi berkembangnya profesionalisme militer dan cenderung membahayakan kepentingan militer.

Hubungan sipil-militer yang memburuk pada awal tahun 2001, memudahkan kekuatan partai-partai politik penentang Presiden Abdurrahman Wahid menjatuhkan pemerintahan. Tanpa dukungan militer, kekuatan politik Presiden Abdurrahman Wahid semakin berkurang untuk mempertahankan kekuasannya. Sidang Istimewa yang digelar pada akhir Juli 2001 memiliki agenda utama yaitu mengganti Presiden Abdurrahman Wahid oleh Wakil Presiden Megawati. Diyakini, naiknya Megawati menjadi Presiden RI ke-5 merupakan hasil kompromi kekuatan partai-partai politik yang didukung oleh militer. Campur tangan Presiden Abdurrahman Wahid yang dianggap berlebihan dalam tubuh militer menjadi penyebab utama penentangan militer terhadap kepemimpinannya. (Chrisnandi, 2005)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Militer-Sipil Dalam Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid

Militer-sipil merupakan suatu aspek dari keamanan nasional. Keamanan nasional berupaya untuk meningkatkan keamanan dalam kelembagaan sosial, ekonomi dan politik di dalam negara. Yang bertujuan tidak lain untuk melawan berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh negara merdeka lainnya. Keamanan nasional dibagi menjadi tiga bentuk dan dua tingkat. Kebijakan keamanan militer mencakup aspek kegiatan yang tujuannya untuk mengurangi dan meniadakan upaya untuk melemahkan atau melemahkan negara melalui penggunaan kekuatan yang beroperasi dari luar batas kelembagaan dan teritorialnya. Kebijakan keamanan internal menanggapi ancaman berbagai kekuatan yang beroperasi di dalam lembaga dan wilayah dari upaya menumbangkan untuk melemahkan atau merusak negara.

Pada masa-masa awal pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan militer Presiden Abdurrahman Wahid bertentangan dengan kontrol sipil atas militer, meskipun kebijakan tersebut bertentangan dengan keinginan militer. Kontrol sipil terhadap militer yang kurang efektif pada masa awal Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama. Dari akhir Desember 2000 hingga Februari 2001, militer mulai menentang rencana kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, yang akan mengangkat Letnan Jenderal Agus WK dan Jenderal Tyasno ke posisi yang lebih tinggi. Jenderal Tyasno Sudarto dan Letjen Agus

Wirahadikusumah dicopot dari jabatannya dan menolak menggantikan Kapolri (Pol) Bimntoro dan mengangkat Komjen (Pol) Chairuddin Ismail

Hubungan Presiden Abdurrahman Wahid dengan militer sejajar dengan hubungannya dengan politisi sipil. Dia memulai dengan baik, dengan mengangkat Juwono Sudarsono menjadi Menteri Pertahanan dan Laksamana Widodo A.S. sebagai Panglima ABRI. Juwono Sudarsono merupakan orang sipil yang menduduki kursi Menteri Pertahanan sejak akhir tahun 1950-an. Dan sebagai akademisi yang dihormati dan mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), dia merupakan jembatan yang ideal antara sipil dan dunia militer.

Di era orde baru, militer sepenuhnya menjadi alat kekuasaan politik Soeharto yang bersifat otoriter, militer menjadi politik orde baru. Peran sosial-politik militer yang sangat luas pada saat itu menyebabkan tidak berkembangnya kehidupan demokrasi dan militer tidak lagi profesional. Era reformasi, militer memulai untuk merefleksikan yang telah dilakukan di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menyadari kesalahan masa lalu dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Militer telah mengajukan paradigma baru, melakukan reformasi internal, dan mengedepankan serangkaian konsep. Mendefinisikan ulang, mereposisi dan merealisasikan kembali peran mereka dalam kehidupan berbangsa dan pemerintahan negara bagian untuk memandang ke masa depan. Intinya, yang dilakukan adalah bekerja keras untuk memperbaiki dan meningkatkan citra dan prestasi di bidang kemiliteran.

Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999 hingga Juli 2001), fenomena hubungan militer-sipil dapat dikatakan telah melalui tiga tahapan yang masing-masing terjadi dalam kurun waktu yang singkat., Yang meliputi:

1. Pada masa transisi dari pemerintahan Presiden Habibie ke pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, peran dan pengaruh politik militer sangat menentukan keberhasilan konferensi MPR;
2. Setelah kabinet pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid membentuk dan membentuk pemerintahan baru, Presiden mulai menggunakan kekuasaannya untuk mengatur ketentaraan;
3. Situasi dimana Presiden Abdurrahman Wahid tidak bisa lagi mengontrol tentara dan menyerah pada tekanan militer.

Abdurrahman Wahid memiliki legitimasi yang kuat, namun ia belum meletakkan dasar supremasi warga negara. Meskipun Presiden Abdurrahman Wahid tidak memiliki latar belakang politik dan militer seperti Soeharto, ia tetap mencoba menggunakan metode Soeharto untuk membawa tentara di bawah kendalinya. Akibatnya, para pemimpin militer Indonesia meningkatkan kecurigaan terhadap politisi sipil. Selama periode ini, tekanan politik dan masyarakat sipil juga mereda, melemahkan faktor latar belakang yang memungkinkan presiden sipil yang memiliki pengalaman politik melakukan reformasi militer.

Hubungan militer-sipil di bawah Presiden Abdurrahman Wahid mengalami proses dinamis dari pengaruh militer yang dominan hingga kontrol sipil, dan kemudian warga sipil kehilangan kendali atas militer. Hubungan yang

berkelanjutan memiliki karakteristik yang unik, Prajurit sering merasa bahwa mereka diganggu oleh warga sipil, sedangkan urusan sipil percaya bahwa tentara tidak dikendalikan oleh warga sipil. Yang terjadi adalah hubungan militer-sipil yang menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Dalam hubungan ini, satu sama lain merasa memiliki pandangan yang tidak habis-habisnya ketika merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan masalah militer, terutama separatisme dan masalah struktural militer yang sama.

Menurutnya, kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap militer semata-mata menuntut spesialisasi militer dan harus tunduk pada aturan administrasi sipil. Ia menilai militer bertanggung jawab atas urusan sipil yang dipimpin oleh presiden, sehingga tanpa sepengetahuan atau kewenangan urusan sipil, tentara tidak dapat merumuskan kebijakannya sendiri. Menurut Abdurrahman Wahid, militer harus melaksanakan perintah presiden, karena presiden sebagai pemimpin nasional akan bertanggung jawab untuk membuat kebijakan menjadi tugas MPR. Meski banyak tuduhan, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ia kerap mencampuri urusan militer, namun ia sendiri tak pernah merasa kebijakannya diganggu militer.

Oleh karena itu, urusan sipil yang dipimpin oleh Presiden Abdurrahman Wahid tidak ingin ada pengaruh militer yang kuat di masyarakat, dan urusan sipil yang menjalankan kekuasaan atas militer tidak diterima oleh militer. Akibatnya, tentara merasa bahwa mereka memiliki hak dan kewenangan untuk mengadopsi kebijakan mereka. Hubungan antara keduanya tidak seimbang, dan keduanya tidak dapat bekerja sama dengan baik. Yang satu cenderung mendominasi yang

lain. Selama tiga masa jabatan presiden setelah reformasi, hubungan militer-sipil Indonesia belum mencapai bentuk ideal yang logis dari supremasi sipil.

Ini membuktikan bahwa di era Presiden Abdurrahman Wahid kontrol sipil atas militer semakin melemah. Pihak militer juga menilai Abdurrahman Wahid kurang memperhatikan militer dan dianggap acuh terhadap militer, sehingga kebijakannya dianggap kontroversial bagi militer. Tanda-tanda terbaru ini semakin memperkuat persepsi masyarakat bahwa di tahun kedua Presiden Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, warga sipil tidak dapat lagi mengontrol militer dan dapat dinilai sebagai politik dari Presiden Abdurrahman Wahid. Sehingga membuat dia melemah dan lengser dari kursi jabatannya sebagai seorang Presiden.

Hubungan militer-sipil yang harmonis menjadikan negara ini semakin demokratis. Militer tidak dapat dipisahkan dari sipil, karena sipil sebagai kontrol sosial yang dimana sipil merupakan media pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi, begitupun dengan militer merupakan sebagai alat keamanan dan pertahanan yang menjaga negara. Para profesional militer dan sipil harus benar-benar memahami peran dan fungsi mereka didalam negara. Sehingga dapat terciptanya profesionalisme militer-sipil.

1. Konsep Militer-Sipil K. H Abdurrahman Wahid

Menurut Abdurrahman Wahid, konsep supremasi sipil merupakan prasyarat bagi tegaknya demokrasi. Demokrasi menuntut partisipasi masyarakat melalui pemilu. Militer harus mematuhi warga sipil yang dipilih oleh masyarakat melalui mekanisme elektoral. Konsep supremasi sipil berbeda di beberapa negara.

Namun pada prinsipnya, militer harus menaati pemimpin yang dipilih melalui pemilu. Karena ini bagian dari mekanisme demokrasi. Disebutkan juga bahwa militer tidak dapat berpartisipasi dalam politik karena peran politik ada di tangan warga sipil terpilih. Militer adalah sarana nasional. Militer harus menjadi kekuatan negara, dan sudut pandangnya adalah peraturan dan kebijakan politik negara. Peraturan dan kebijakan itulah yang menjadi pedoman militer dalam menjalankan tugasnya. Namun, masyarakat sipil juga harus memberikan kekuasaan yang cukup kepada militer untuk mengelola potensi internal militer. Militer harus diberi kewenangan teknis untuk mengatur militer yang profesional sehingga supremasi warga sipil bisa terjaga dengan utuh.

Presiden sebagai pemimpin terpilih berhak menetapkan kebijakan. Karena itu, Presiden Abdurrahman Wahid sengaja mengangkat Panglima TNI dari Angkatan Laut, Laksamana Widodo AS. Selama beberapa dekade, komandannya berasal dari AD. Kekuatan negara kita terletak di laut, tidak ada perputaran. Karena itu, Presiden Abdurrahman Wahid memperkuat fungsi tersebut dengan membentuk Kementerian Kelautan. Presiden juga diberi wewenang untuk diturunkan untuk tujuan peperangan melalui para panglima TNI. Oleh karena itu, sebagai wujud supremasi sipil, Presiden Abdurrahman Wahid mengangkat Dr. Pak Mahfud sebagai Menteri Pertahanan. Dia adalah warga sipil, tetapi memiliki otoritas dalam hal-hal yang berkaitan dengan militer dan pertahanan nasional.

Meskipun Abdurrahman Wahid adalah warga sipil, ia tetap menempatkan tentara pada posisinya yang sebenarnya, yakni sebagai alat negara, bukan sebagai alat penguasa. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid, terlihat

kebijakannya adalah membentuk kekuatan sipil tertinggi tanpa melibatkan peran militer, antara lain:

1. Kedekatan Gus Dur pada kelompok-kelompok pro demokrasi (kelompok-kelompok kiri), untuk berusaha mengurangi pengaruh militer dalam kehidupan sosial masyarakat yang telah tertanam selama Orde Baru;
2. Melakukan efektifitas dalam pemisahan antara Polri dengan TNI, dengan pemisahan aturan politik antara kepolisian dan militer;
3. Berusaha mengurangi anggaran militer;
4. Menempatkan militer hanya terbatas pada kekuatan pertahanan negara secara eksternal;
5. Mendukung pengubahan struktur territorial militer;
6. Mendukung untuk tidak hadirnya peranan intelejen militer secara domestik;
7. Menghapus aktivitas militer dalam kancah bisnis;
8. Mengutamakan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara dengan mengesampingkan angkatan darat, sebagai bentuk memecah militer;
9. Mengurangi peranan politik militer dalam kabinet dan MPR-DPR, serta mengurangi personalitas militer dalam institusi sipil sebagai menteri, gubernur, dan kedutaan.

Dari kebijakan diatas bahwa bentuk dari hubungan militer-sipil di era Abdurrahman Wahid ditandai dengan upaya Abdurrahman Wahid untuk melanjutkan proses depolitisasi militer dengan pendekatan legalis kelembagaan formal. Sayangnya, tidak ada konsep yang jelas tentang kreasi Abdurrahman

Wahid tentang supremasi sipil seutuhnya, yang tampaknya tak terukur. Salah satu inisiatif penting Abdurrahman Wahid untuk menciptakan supremasi sipil adalah terpilihnya Laksamana Widodo yang lebih mendukung status politik dan ekonomi liberal daripada Panglima TNI. Mengingat TNI menduduki posisi terdepan sejak berdirinya organisasi militer Indonesia. Selain itu, Abdurrahman Wahid mengangkat seorang guru besar sipil sebagai Menteri Pertahanan, dan memilih Menteri Pertahanan dari pemerintahan sipil. Juwono Sudarsono kemudian digantikan oleh seorang guru besar. Dr. Mahfud M.D.

Oleh karena itu, pada era Abdurrahman Wahid terdapat beberapa kegagalan dalam pencapaian supremasi warga negara. Pertama, mengenai definisi dan penerapan konsep supremasi sipil, tidak ada kesepakatan antara sipil dan militer. Kedua, hubungan militer-sipil yang bercirikan kekuasaan militer pada orde baru ternyata menjadi penghambat utama demokrasi. Ketiga, mengurangi inefisiensi beberapa kekuatan militer. Kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid membuat Presiden Abdurrahman Wahid mengalami pemakzulan melalui poros pusat atau DPR. Pemakzulan tidak dilakukan secara langsung oleh militer, karena militer telah menetapkan komitmen untuk mencapai profesionalisme, tetapi militer tidak ingin arah kebijakan dwifungsi yang mengakar dalam sistem nasional terhapus.

Militer dan sipil merupakan indikator terpenting dalam menjaga sebuah supremasi warga negara. Ide dasar militer-sipil berasal dari dua kerangka kerja. Pertama, melihat militer dalam kerangka berpikir demokratis berarti menempatkan militer di bawah kekuasaan sipil absolut. Militer harus mematuhi

otoritas sipil dan memainkan peran keamanan murni sebagai instrumen negara yang dipimpin sipil. Supremasi sipil atas militer dapat dikembangkan dengan dua cara, yaitu memperkuat hak-hak sipil atau lebih jauh melakukan militerisasi militer.

B. Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Terhadap Eksistensi Militer Dalam Negara

Profesi militer melayani negara dan warga sipil. Untuk memberikan tingkat layanan tertinggi, seluruh profesi dan kekuatan militer dan sipil di bawah kepemimpinannya harus ditetapkan sebagai alat kebijakan nasional yang efektif. Karena arah politik hanya datang dari level tertinggi, ini berarti profesi harus diatur dalam hierarki ketaatan. Agar profesi dapat menjalankan fungsinya, setiap level harus dapat memperoleh ketaatan dan loyalitas dari bawahannya. Tanpa hubungan semacam ini, profesionalisasi militer-sipil tidak mungkin tercapai.

Militer merupakan indikator yang terpenting di sebuah negara, dengan menjalin hubungan yang baik, maka segala problematika di sebuah negara dapat diatasi dengan baik Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid seperti yang kita ketahui memang tidak terlalu lama. Akan tetapi Presiden Abdurrahman Wahid ini mampu membuat hubungan militer-sipil cukup baik meskipun banyak sekali kontroversi yang dihadapinya hingga dia lengser dari jabatannya sebagai presiden.

Tanggung jawab militer terhadap negara dibagi menjadi tiga tingkatan: Pertama, fungsi perwakilan, mewakili kebutuhan peralatan nasional untuk keamanan militer. Dia harus memberi tahu otoritas negara tentang batas keamanan militer minimum yang harus dipegang dalam kemampuan negara lain. Kedua,

perwira militer memiliki fungsi penasehat dan dapat menganalisis dan melaporkan semua efek dari bidang alternatif pada operasi nasional dari perspektif militer. Ketiga, perwira militer memiliki fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan keputusan nasional berdasarkan keamanan militer, meskipun keputusan tersebut bertentangan dengan pertimbangan militer. Politisi menetapkan tujuan dan mengalokasikan sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuat banyak perubahan besar dalam militer. Gus Dur secara bertahap mengurangi kehadiran militer dalam kehidupan sosial dan politik. Beberapa perubahan pada era Presiden Abdurrahman Wahid dimulai dengan mereformasi misi TNI untuk kembali ke barak. Karena pada masa Orde Baru, hampir semua posisi sipil dikuasai oleh tentara aktif. Mereka berpartisipasi dalam forum bernama Golongan Karya. Tujuannya untuk memastikan netralitas prajurit nasional, sehingga TNI benar-benar berkomitmen menjaga negara dari ancaman yang lebih besar. Tindakan berani yang juga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid dalam masa kepresidenannya yang relatif singkat terhadap militer adalah dengan mengangkat Laksamana TNI AL Widodo AS sebagai Pangab. Rotasi ini tidak pernah terjadi dalam masa 32 tahun pemerintah Soeharto karena Pangab selalu otomatis dipegang oleh Jenderal TNI AD.

Tindakan lain yang lebih menakutkan adalah memecat Jend (Purn) TNI Wiranto sebagai Menkopolkam dengan alasan yang tidak jelas. Seorang Presiden sipil memecat pensiunan Jenderal. Beliau juga mengangkat seorang

akademisi sipil bernama Mahfud MD menjadi Menteri Pertahanan. Di era Orde Baru Menteri pertahanan dijabat oleh seorang pensiunan Jenderal (biasanya mantan Pangab). Memisahkan TNI dan Polri dalam rangka menjalankan fungsinya masing-masing pada saat Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dikukuhkan dengan Ketetapan MPR / VI / 2000 tentang Pemisahan TNI-Polri, dan melakukan rotasi pimpinan tertinggi TNI (Panglima TNI), biasanya TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan selanjutnya Angkatan Udara.

Lebih kepada kebijakan Gus Dur yg sering mengacak acak kabinetnya dengan waktu cepat dan menuduh menterinya seperti Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi terlibat kasus KKN. Dengan kebijakannya yg drastis dan tidak memuaskan parlemen termasuk partainya. Membuat Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Seorang presiden harus mempunyai kekuatan di partai koalisi atau militer. Sehingga hal yang seperti ini tidak terjadi.

Pada masa reformasi, di bawah kepemimpinan Presiden K. H Abdurrahman Wahid, militer Indonesia mereformasi diri dan merealisasikan kehidupan sosial politik yang dibangun oleh pemerintahan Soeharto, melakukan reformasi profesional dan memulihkan dominasinya. Dwifungsi tersebut awalnya digagas oleh A. H Nasution, yaitu membantu dan menjadi kemitraan, atau mitra urusan sipil yang dibentuk dalam bentuk demokratisasi melalui sistem pemilihan umum. Dalam pemerintahan saat ini dibentuk melalui pemilihan umum merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan sistem demokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak rakyat agar wakil rakyat dan pejabat eksekutif dapat terpilih menjadi pemimpin.

Posisi militer yang hanya berfungsi sebagai alat kekuatan pertahanan negara tidak memperkenankan militer masuk ke dalam wilayah politik yang menjadi kewenangan sipil. Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, otoritas sipil memiliki keleluasan untuk mengatur masyarakatnya melalui kebijakan dan pengelolaan pemerintahan tanpa kekhawatiran ancaman militer. Kondisi ini mendukung terbentuknya masyarakat sipil yang kuat yang diharapkan mampu mengendalikan militernya dalam batas-batas kebijakan yang ditentukan. Konsolidasi demokrasi akan berhasil bila kekuatan sipil memiliki visi yang sama untuk tidak menarik kembali militer berpolitik..

Pemanfaatan militer untuk memperkuat posisi politik maupun dukungan politik bagi kekuatan politik sipil tertentu dapat memperlemah masyarakat sipil sendiri mengkonsolidasikan demokrasi. Karena demokrasi memerlukan keadaan yang dimana kebebasan berpikir berpendapat dan berekspresi mendapatkan ruang yang seluas-luasnya. Untuk itu otoritas sipil yang memegang kekuasaan harus memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa ia mampu mengendalikan dan mengatur militernya. Kegagalan otoritas sipil mengendalikan militer dikhawatirkan dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi yang berjalan..

Kebijakan presiden Abdurrahman Wahid yang dilakukan itu pada gilirannya untuk membangkitkan kekhawatiran lama tentara yang melihat kontrol sipil atas militer (supremasi sipil) mengancam otonomi dan integritas Angkatan Bersenjata secara institusional. Dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh presiden Abdurrahman Wahid tersebut memungkinkan militer didalam negara berperan sebagai penjaga stabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang

demokratis, serta mencerminkan dinamika sosial dan politik di ruang publik, guna menjaga kedaulatan negara. Peran Indonesia dalam peran militer sebagai penekan pertahanan dan keamanan sistem multi basis, sehingga membuka proses dialog kehidupan sosial dan politik. Untuk mencegah aksi militer yang berusaha mengganggu proses demokratisasi dalam mereformasi kehidupan.

Secara teori Kontrol Sipil atas Militer yang dikemukakan oleh Samuel P Huntington mengenai pembahasan diatas bahwa ada tiga aspek untuk menilai profesionalisme militer maupun profesionalisme sipil untuk menciptakan hubungan militer-sipil yang profesional, yaitu: keahlian, tanggung jawab, dan semangat korps. Keahlian militer merupakan hasil paduan dari proses pembelajaran dengan pengalaman. Militer yang profesional harus mengerti betul tanggung jawabnya. Begitupun sebaliknya dengan sipil. Kompensasi harusnya bukanlah hal yang paling dasar yang dijadikan pegangan namun bagaimana melaksanakan kewajibannya menjadi hal yang lebih panjang bagi militer-sipil profesional. Ikatan kesatuan dan kesadaran korps merupakan faktor lain yang harus dimiliki militer yang profesional. Sama halnya seperti keahlian, kesatuan, dan kesadaran kelompok didalam masyarakat sipil. Dan ini hanya dapat dibangun dengan sosialisasi atau pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil maka peneliti dapat menarik kesimpulann bahwa:

1. Pengaruh militer yang yang menguat ditengah masyarakat tidak dikehendaki oleh pemerintahan sipil pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, sementara pemerintahan sipil yang menggunakan otoritasnya terhadap militer, juga tidak dapat diterima oleh militer. Hubungan yang berlangsung memiliki corak yang unik, dimana militer merasa senantiasa di intervensi sipil, sementara pemerintahan sipil merasa militer tidak tunduk terhadap supremasi sipil. Yang terjadi adalah hubungan militer-sipil yang membuat ketegangan diantara keduanya, dimana satu dan yang lain merasa tidak memiliki visi yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah militer, khususnya masalah separatism dan jabatan struktural kemiliteran.
2. Kebijakan-kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang ditujukan bagi militer, menurutnya semata-mata untuk menegakkan profesionalisme militer yang harus mengikuti aturan pemerintahan sipil. Dalam pandangannya, militer bertanggung jawab kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Presiden sehingga militer tidak bisa menentukan kebijakannya sendiri tanpa sepengetahuan atau wewenang yang diberikan

pemerintahan sipil. Hubungan militer-sipil bisa dibangun dengan hadirnya profesionalisme militer dan juga “profesionalisme sipil”, misalnya dengan tidak menambah hak politik militer melalui pelibatan militer dalam politik praktis.

3. Dengan beberapa kebijakan yang dilakukan oleh presiden Abdurrahman Wahid tersebut memungkinkan militer didalam negara berperan sebagai penjaga stabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, serta mencerminkan dinamika sosial dan politik di ruang publik, guna menjaga kedaulatan negara.

B. Saran

Peneliti yang dilakukan telah berhasil menganalisa Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil. Untuk itu saran dari penelitian ini adalah.

1. Militer Indonesia hingga saat ini masih belum sampai pada titik maksimal. Temuan-temuan yang ada mengindikasikan bahwa hubungan militer-sipil di Indonesia sudah mencapai titik yang baik namun masih harus dilanjutkan untuk menjadi maksimal. Jika sebelumnya fokus lebih diberikan pada penataan regulasi maka, sepuluh tahun ke depan harus ditempatkan dalam koridor profesionalisme sipil dan militer. Sipil harus mampu menjaga kondisi kepatuhan militer, mengingat militer adalah instrumen keamanan negara, dan militer harus bergerak kearah profesionalisme profesinya dengan meningkatkan keahliannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. Alfian. *Menjadi pemimpin politik*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Choirie Efendi. *PKB Politik Jalan Tengah NU*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 2002.
- Mufid Achmad. *Ada Apa Dengan Gus Dur*, Yogyakarta: Kutub, 2005.
- Ridjaluddin. *Demokrasi Pemikiran Gus Dur dan Keterpaduannya Dengan Demokrasi Amien Rais Dan Syafi' Ma'arif*, Jakarta, 2004.
- Wahid Abdurahman. *Membangun Demokrasi*, Editor Zaeni Shofari Al-Raef, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Wahid Abdurrahman. *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo, 1997.
- Wahid Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Al-Brebesy, Ma'mun Murod. *Menyingkap Pemikiran politik Gusdur dan Amin Rais tentang Negara*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Thoha, miftah. 2017. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Cet: XIX. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Ahmad,Munawar Dr. *Ijtihad Politik Gus Dur*,Yogyakarta,LKiS,2010
- Remage, Douglas E. *Demokratisasi, Toleransi Agama dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid*, dalam Greg Fealy dan Greg barton, *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Cet. I;Yogyakarta: LKiS, 1997.

- Mustofa, *Membangun budaya kerakyatan kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan social NU*. Yogyakarta; Titian ilahi press; 1997
- Kardi, Koesnadi. "Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* (2015): 231-256.
- Tippe, Syarifudin. "Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* (2015): 287-303.
- Syahrul, Fathullah, and Muh Abdi Goncing. "Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6.2 (2020): 75-86.
- Riza, Efriza. "Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi." *Communitarian* 2.1 (2019).
- Mahfud, M. D. (2010). *Gus Dur; Islam, Politik dan Kebangsaan (Bonus VCD Munajat & Shalawat bersama Gus Dur, Mahfud MD dan Soraya)*. Lkis Pelangi Aksara.
- Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Lkis Pelangi Aksara, 2002.
- Siddiq, Mohammad. "Profesionalisme Militer pada Pemerintahan Soeharto dan Abdurrahman Wahid." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 11.1 (2019): 21-33.

- Wahid, KH Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. LKIS Pelangi Aksara, 2010.
- Naim, Abu. "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 6.1 (2014): 1-20.
- Suaedy, Ahmad. *Gus Dur: Islam Nusantara & Kewarganegaraan Bineka*. Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- AminI, Widiana. *Hegemoni Kekuasaan Dalam Sistem Politik Indonesia: Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi*. 2019.
- Ahmad, Munawar. *Ijtihad Politik Gus Dur; Analisis Wacana Kritis*. Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Arif, Syaiful. *Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif*. Penerbit Koekoesan, 2009.
- Ahmad, Maghfur. *Gus Dur: Islam, Negara, & Isu-isu Politik*. 2021.
- Soim, Musa. *Analisis pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang partai politik Islam di Indonesia*. Diss. UIN Walisongo, 2018.
- Said, Salim. *Dari Gestapu ke reformasi: Serangkaian kesaksian*. Mizan Pustaka, 2013.
- Said, Salim. *Menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto*. Mizan Pustaka, 2016.

- Suparno, Basuki Agus. *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas, 2012.
- Chrisnandi, Yuddy. *Reformasi TNI: perspektif baru hubungan sipil-militer di Indonesia*. LP3ES, 2005.
- Leni, Nurkhasanah. Keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, 9.1: 31-45.
- Fattah, Abdoel. *Demiliterisasi Tentara; Pasang Surut Politik Militer 1945-2004*. Lkis Pelangi Aksara, 2005.
- Emzir, Metodologi; PD, M. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis data. *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012.
- Said, Budiman Djoko. *Menakar Ulang Hubungan Sipil–militer (HSM)*. 2013.
- Sukri, Mhd Alfahjri. *Perbandingan Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia Pada Masa Abdurrahman Wahid Dengan Erdogan Di Turki*. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2020, 5.2: 130-146.
- Rahman, Zaqui; Ryacudu, Pertahanan Ryamizard. *Program Bela Negara Sebagai Perwujudan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara*. *Jurnal Rechtsvinding Online BPHN*, 2015.

- Adam Sukarno Putra, N. U. (2019). *The Presidents Political Policy Abdurrahman Wahid About Indonesia Military Years 1999-2001*.
- Ahmad, M. (2010). Yogyakarta: LKiS.
- Amanah, R. D. (n.d.). *Politics Military In Post-New Order Indonesia*, 1.
- ANWAR. (2018). *Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI Dalam Kehidupan Sosial Politik Dan Perekonomian Indonesia*.
- Aprianto, E. (2016). *Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia*.
- Chrisnandi, Y. (2005). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Chrisnandi, Y. (2005). Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Edward L. Poelinggomang, S. M. (2002). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emzir. (2014). Jakarta: Rajawali Pers.
- Enggi Makhasuci, D. H. (n.d.). *Pergeseran Peranan Militer Masa Transisi Pemerintahan Indonesia (1997-2000)*, 6-11.
- Fattah, A. (2005). Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Genschel, D. (2002). *Tempat dan Peran Militer dalam Masyarakat Sipil yang Demokratis, Pengalaman Reformasi Militer Jerman*.
- Greg Berton, H. S. (2000-2001). Yogyakarta: LKiS.

- Hornby, A. (1974). *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Corrent English* ,
536.
- Huntington, S. P. (2003). Jakarta: PT Grasindo.
- Janowitz, M. (2001). *The Military Intervenes: Case Studies in Political
Development Russel Sage*, 9-12.
- Kardi, K. (2014). *Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di
Indonesia*.
- Leni, N. (2013). *Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik di Indonesia*.
- MADANI. (2019). *Profesionalisme Militer Pada Pemerintahan Soeharto dan
Abdurrahman Wahid (Kajian Perbandingan Sosial-Historis)*.
- Nasution, A. H. (2014). Yogyakarta.
- Nawawi, H. (2002). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pamungkas, S. B. (2001). Jakarta: Erlangga.
- Peter Balu, R. S. (1962). *Formal Organization, Chandler*, 54.
- Pribadi, T. (2007). Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rasyid, T. (2017). Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.
- Ryacudu, R. (2019). Jakarta: Biro Humas Setjen Kemhan.
- Said, S. H. (2018). Bandung: PT Mizan Pustaka.

Sanit, A. (2012). Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, B. (2000). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Setiawan, D. (2013). *Perkembangan Hubungan Militer dengan Sipil di Indonesia*.

Soim, M. (2018). *Analisis Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Tentang Partai Politik Islam di Indonesia*, 86.

Thoha, M. (2011). Jakarta: Kencana Media Group.

Wawan Ichwanuddin, S. H. (2014). Jakarta: LIPI Press.

Wulan, A. R. (2008). Jakarta.

Yulianto, A. (2002). Jakarta: Raja Grafindo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Noprianzah
Tempat/ Tanggal Lahir : Muara Tenang, 27 November 1998
Agama : Islam
Anak : Anak Ke-1 dari 2 Bersaudara
Alamat : Jalan Harapan Jakabaring Lorong Merpati RT 22
RW 05 Kel. Silabaeranti Kec Seberang Ulu I Kota
Palembang Sumatera Selatan
Ayah dan Ibu : Kolman Bahdi dan Jumhainah
Ponsel : mnoprianzah27@gmail.com
No Telepon : 085279655963

Riwayat Pendidikan:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Palak Tanah (2005-2011)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Semende Darat Tengah (2011-2014)
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Muara Enim (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (2017-2021)

Pengalaman Organisasi:

1. CSR Millenials Kesejahteraan Sosial Sumatera Selatan Divisi Humas (2019-Sekarang)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Selasa tanggal 8 bulan Juni tahun 2021 telah dilaksanakan sidang ujian skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : M. Noprianzah
Nomor Induk Mahasiswa : 1730702070
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pemikiran K.H. Abdurahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil*

MEMUTUSKAN

1. Setelah mengumpulkan Nilai Teori dan hasil Munaqasyah pada sidang yang telah diselenggarakan maka saudara teruji dinyatakan ~~LULUS~~ / ~~TIDAK-LULUS~~, dengan Indeks Prestasi Kumulatif —. Oleh karena itu saudara berhak memakai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos).
2. Perbaikan dengan tim penguji selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum penutupan pendaftaran wisuda terhitung sejak ditetapkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan poin di atas, maka dinyatakan belum bisa diikutsertakan mengikuti wisuda yang diselenggarakan pada periode berjalan.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagai mana mestinya.

Tim Penguji:

No.	Tim Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Kun Budianto, M.Si.	Pembimbing I	
2	Yulion Zalpa, MA.	Pembimbing II	
3	Ainur Ropik, M.Si.	Penguji I	
4	Ryllian Chandra Eka Viana, MA.	Penguji II	

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 8 Juni 2021

Ketua

Dr. Eti Yusnita, S.Ag., M.HI.
NIP: 197409242007012016

Sekretaris

Reni Apriani, M.Si.
NIDN. 2021049401



Scanned with
CamScanner



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

SURAT KETERANGAN

Ketua Sidang Munaqasyah Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial UIN Raden Fatah Palembang dengan ini menerangkan :

Nama : M. Noprianzah
Nomor Induk Mahasiswa : 1730702070
Jurusan/Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : *Pemikiran K.H. Abdurahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 setelah melalui sidang maka dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~** dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) _____

Palembang, 8 Juni 2021
Ketua Sidang

Dr. Eri Yusnita, S.Ag.,M.HI.
NIP. 197409242007012016



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING I

Nama Mahasiswa : M. Noprianzah
NIM : 1730702070
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : **Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil**
Pembimbing I : Dr. Kun Budianto, M.Si

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Senin 26 Oktober 2020	Perbaikan BAB I Latar Belakang	
2.	11 Nov 2020 Rabu	ACC BAB I Lanjut ke BAB II	
3.	19 Des 2020 Senin	Perbaikan BAB II	
4.	6 Jan 2021 Kamis	ACC BAB II Lanjut ke BAB III	
5.	16 Feb 2021 Selasa	Perbaikan BAB III	
6.	22 Maret 2021 Senin	ACC BAB III Lanjut ke BAB IV dan BAB V	
7.	25 April 2021 Jumat	Perbaikan BAB IV & BAB V	
8.	27 Mei 2021 Kamis	ACC BAB IV & BAB V	
9.	3 Juni 2021 Kamis	Lanjut untuk ujian komprehensif & skripsi	



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMBIMBING II**

Nama Mahasiswa : M. Noprianzah
 NIM : 1730702070
 Program Studi : Ilmu Politik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Judul Skripsi : Pemikiran K. H Abdurrahman Wahid Tentang Relasi Militer-Sipil
 Pembimbing II : Yulion Zalpa, M.A

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
1.	Selasa 27 Oktober 2020	Perbaikan BAB 1 bagian Kelangka Teori	
2.	Kamis 12 NOV 2020	ACC BAB 1 Lanjut untuk ke BAB II	
3.	Selasa 15 DES 2020	Perbaikan BAB II	
4.	Jumat 8 Jan 2021	ACC BAB II lanjut ke BAB III	
5.	Senin 15 Feb 2021	Perbaikan BAB III dan Dinamika politik	
6.	Selasa 21 Maret 2021	ACC BAB III lanjut ke BAB IV	
7.	Kamis 22 April 2021	Perbaikan BAB IV	
8.	Rabu 26 Mei 2021	Perbaikan BAB IV bagian B	
9.	Senin 31 Mei 2021	Perbaikan BAB IV bagian B	
10.	Kamis 3 Juni 2021	ACC BAB IV lanjut bikin Abstrak & BAB V	



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No.1 Km.3.5 Palembang 30126 Telp: (0711)354668 Website : www.radenfatah.ac.id

No.	Hari / Tanggal	Uraian Materi yang Dikonsultasikan	Tandatangan Pembimbing
11.	Jumat 4 Juni 2021	ACC BAB V lanjut untuk Ujian Komprehensif dan Ujian Skripsi	